



**PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK
KELAS 1A**

2023

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

Telepon
(0561) 734100

Website
www.pn-pontianak.go.id

Alamat
Jln. Sultan Abdurrahman No. 89



KATA PENGANTAR



AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO
KETUA PN PONTIANAK KELAS 1A

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak.

Pengadilan Negeri Pontianak sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kota Pontianak berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai Tugas Pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2023 disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 38/SEK.01/OT 1.6/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023. Sesuai surat tersebut maka data yang kami sajikan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 adalah terdiri dari komponen bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan (per tanggal 29 Desember 2023). Laporan Tahunan sebagai gambaran terpenuhinya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak dalam 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan sesuai basis kinerja yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini diharapkan bermanfaat dan memacu peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pontianak untuk tahun-tahun yang akan datang.



Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, Amin.

Pontianak, 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A



AKHMAD FIARSYAH JOKO SUTRISNO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN	1
B. VISI DAN MISI	3
C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA).....	3
1. TUJUAN STRATEGIS	4
2. SASARAN STRATEGIS	4
BAB II	5
KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	5
(Sertifikasi ISO Pengadilan)	5
A. KEADAAN PERKARA TAHUN 2023.....	5
1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA.....	6
2. KEADAAN PERKARA BANDING	6
3. KEADAAN PERKARA KASASI.....	7
4. KEADAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI	7
B. PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2023.....	8
1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS.....	8
2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU.....	8
3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI.....	9
4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MEDIASI.....	9
5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI.....	9
C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL.....	10
1. POSBAKUM (POS PELAYANAN HUKUM)	10
2. SIDANG KELILING / PELAYAN TERPADU	11
3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA).....	11
D. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)	12
BAB III.....	14
SUMBER DAYA MANUSIA	14





A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN	14
1. MUTASI	14
2. PROMOSI.....	15
3. KENAIKAN PANGKAT PER APRIL / OKTOBER.....	16
4. PEGAWAI YANG PENSIUN	16
5. DIKLAT (SDM TEKNIS / NON TEKNIS)	17
BAB IV.....	21
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	21
A. PENGELOLAAN KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN TEKNIS DAN NON TEKNIS)	21
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	22
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	23
1. PENGADAAN	23
2. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG	23
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	27
1. IMPLEMENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A	27
2. IMPLEMENTASI E-BERPADU DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.....	29
3. IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.....	31
4. IMPLEMENTASI ERATERANG DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM	37
BAB V	39
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	39
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	39
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	44
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	46
1. APLIKASI SUTERA WA+	47
2. APLIKASI SETARA	49
3. APLIKASI E-PERMA	50
4. APLIKASI INFORMASI HARIAN PENGADILAN (INDI).....	53
5. BROSUR AUDIO BAGI PENYANDANG DISABILITAS	54
6. BROSUR LAYANAN PRIORITAS	55
7. PENDAFTARAN POSBAKUM SECARA ELEKTRONIK.....	56
8. DIGITALISASI FORM PERSONAL SECARA ELEKTRONIK.....	56
9. PENERAPAN PANGGILAN SIDANG MELALUI AUDIO	57





10.	PENERAPAN PENGUMUMAN AUDIO PERINGATAN PERILAKU ANTI GRATIFIKASI	57
11.	PEMBANGUNAN POS JAGA	57
12.	PEMBUATAN PORTAL MASUK AREA PN PONTIANAK.....	58
13.	PERLUASAN AREA PARKIR KENDARAAN.....	59
14.	PENAMBAHAN MEJA LAPOR SIDANG	59
15.	LAYANAN DISABILITAS.....	60
16.	LAYANAN UMUM	63
D.	PENGHARGAAN YANG DIRAIH	65
BAB VI.....		69
PENGAWASAN.....		69
A. INTERNAL.....		69
B. EVALUASI		72
BAB VII		73
PENUTUP.....		73
A. KESIMPULAN		73
B. REKOMENDASI		74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Piagam Penghargaan Predikat WBK PN Pontianak	13
Gambar 2 Peta e-Court PN Pontianak	28
Gambar 3 Piagam Penghargaan Lomba E-Litigasi Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A	29
Gambar 4 Capture Aplikasi e-Berpadu	31
Gambar 5 Daftar Pembaruan Fitur SIPP Versi 5.2.0	33
Gambar 6 Daftar Pembaruan Fitur SIPP Versi 5.3.0	33
Gambar 7 Daftar Pembaruan Fitur SIPP Versi 5.3.1	34
Gambar 8 Capture Rasio Penyelesaian Perkara PN Pontianak	35
Gambar 9 Nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) PN Pontianak kategori >2000 Perkara	36
Gambar 10 Nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) PN Pontianak kategori Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak	36
Gambar 11 Piagam Penghargaan Lomba Administrasi dan Keuangan Perkara Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A	37
Gambar 12 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu PN Pontianak	41
Gambar 13 Petikan Keputusan Dirjen Badilum Tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus dan 1A Tahun 2022	43
Gambar 14 Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Pontianak	44
Gambar 15 Briefing rutin Petugas PTSP	45
Gambar 16 Piagam Penghargaan Lomba PTSP PN Pontianak	46
Gambar 17 Tampilan Aplikasi "Sutera WA" awal rilis	48
Gambar 18 Tampilan Aplikasi "Sutera WA+" setelah diperbaharui	48
Gambar 19 Tampilan Aplikasi "Setara" PN Pontianak	50
Gambar 20 Tampilan Aplikasi "e-PERMA" PN Pontianak	52
Gambar 21 Piagam Penghargaan Penerapan Inovasi Terbaik Tahun 2023	53
Gambar 22 Banner Aplikasi "INDI" PN Pontianak	54
Gambar 23 Brosur Audio Pelayanan dan Proses Beracara	55
Gambar 24 Brosur Layanan Prioritas	55
Gambar 25 Brosur Digital Formulir Pelayanan Posbakum	56
Gambar 26 Form personal melalui Google Form	57
Gambar 27 Pos jaga PN Pontianak Kelas 1A	58
Gambar 28 Portal Masuk Area PN Pontianak	58
Gambar 29 Area Parkir Kendaraan PN Pontianak Kelas 1A	59
Gambar 30 Meja Lapor Sidang PN Pontianak	60
Gambar 31 Kursi Roda dan Tongkat Bantu Jalan untuk kaum Difabel	60
Gambar 32 Guiding Block di Area Lobby PTSP	60
Gambar 33 Jalur Landai bagi Penyandang Difabel	61
Gambar 34 Kartu Antrian Prioritas	61
Gambar 35 Toilet khusus kaum Difabel yang dilengkapi handrail	61
Gambar 36 Meja Layanan PTSP Prioritas	61



Gambar 37 Pintu Akses Prioritas	61
Gambar 38 Tempat Parkir bagi kaum Difabel	62
Gambar 39 Kursi khusus bagi kaum Difabel	62
Gambar 40 Website yang dilengkapi dengan Akses Disabilitas	62
Gambar 41 Ruang Tamu Terbuka	63
Gambar 42 Co-working Space	63
Gambar 43 Pojok Baca	63
Gambar 44 Kompensasi Pelayanan	63
Gambar 45 Brosur Pelayanan PTSP	63
Gambar 46 Air Minum Gratis bagi Pengunjung	63
Gambar 47 Charging station bagi Pengunjung	64
Gambar 48 Ruang Kesehatan dan Laktasi	64
Gambar 49 Akses Free Wifi	64
Gambar 50 Buku Tamu Elektronik	64
Gambar 51 Kotak Saran	64
Gambar 52 Denah Kantor PN Pontianak	64
Gambar 53 Penghargaan Pengadilan Negeri Pontianak Pelaksanaan Utilisasi BMN Tahun 2022	65
Gambar 54 Penghargaan Pengadilan Negeri Pontianak Lomba Layanan Pengadilan/PTSP	66
Gambar 55 Penghargaan Pengadilan Negeri Pontianak Lomba Administrasi dan Keuangan Perkara Tahun 2023	66
Gambar 56 Penghargaan Pengadilan Negeri Pontianak Lomba E-Litigasi Tahun 2023	67
Gambar 57 Penghargaan Pengadilan Negeri Pontianak Penerapan Inovasi Terbaik Tahun 2023	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data keadaan Perkara Tingkat Pertama diambil dari SIPP PN Pontianak	6
Tabel 2 Data keadaan Perkara Banding diambil dari SIPP PN Pontianak.....	6
Tabel 3 Data keadaan Perkara Kasasi diambil dari SIPP PN Pontianak	7
Tabel 4 Data Perkara Peninjauan Kembali diambil dari SIPP PN Pontianak	7
Tabel 5 Data Sisa Perkara yang diputus diambil dari SIPP PN Pontianak	8
Tabel 6 Data Perkara yang diputus tepat waktu diambil dari SIPP PN Pontianak	9
Tabel 7 Data Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali diambil dari SIPP PN Pontianak	9
Tabel 8 Data Perkara Perdata yang dilakukan Mediasi	9
Tabel 9 Data Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi	10
Tabel 10 Data Layanan Posbakum PN Pontianak.....	11
Tabel 11 Data Personil yang masuk pada PN Pontianak.....	15
Tabel 12 Data Pegawai yang promosi pada PN Pontianak	16
Tabel 13 Data Pegawai PN Pontianak yang naik Pangkat per April / Oktober pada tahun 2023.....	16
Tabel 14 Data Pegawai PN Pontianak yang Pensiun pada tahun 2023	17
Tabel 15 Data Pegawai PN Pontianak yang mengikuti Diklat Teknis / Non Teknis... ..	20
Tabel 16 Rekapitulasi Belanja Pegawai pada PN Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat.....	22
Tabel 17 Rekapitulasi Belanja Barang Operasional pada PN Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat	22
Tabel 18 Rekapitulasi Belanja Modal pada PN Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat	22
Tabel 19 Rekapitulasi Belanja Barang Non Operasional Pada PN Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat	23
Tabel 20 Matrik kendaraan dinas	24
Tabel 21 Matrik keadaan Rumah Dinas.....	24
Tabel 22 Matrik keadaan Sarana / Prasarana	27
Tabel 23 Penunjukan Hakim Pengawas Bidang	71



BAB I

PENDAHULUAN



A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A mempunyai tugas pokok memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

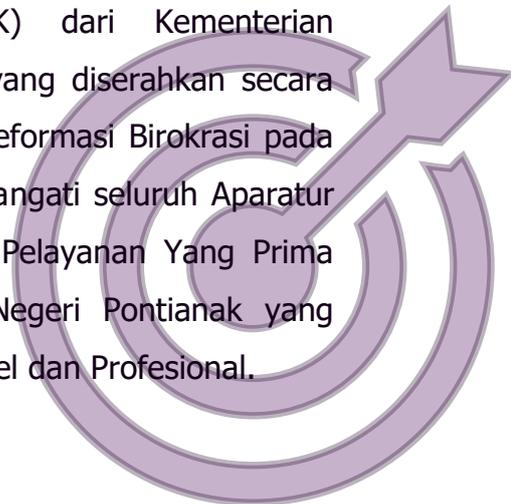
Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan :

1. Melaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan tersruktur;

- 
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional;
 5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional;
 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi;
 10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan kebersamaan, seluruh bagian-bagian dari Aparatur Teknis Judisial dan Non Teknis Judisial yang ada di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah bekerja keras dengan sungguh- sungguh dan saling mendukung satu sama lain, sehingga apa yang menjadi Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”** dapat tercapai.

Selain itu, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah mendapatkan predikat “Akreditasi A-Excellent”, dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sejak Juli Tahun 2018 dan Pengadilan Negeri Pontianak telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diserahkan secara *online* oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tanggal 21 Desember 2020. Hal tersebut semakin menyemangati seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A untuk memberikan Pelayanan Yang Prima kepada pencari keadilan guna mewujudkan Pengadilan Negeri Pontianak yang “MANTAP” Melayani, Amanah, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Profesional.



B. VISI DAN MISI

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sebagai komponen penunjang keberhasilan proses Peradilan Tingkat pertama, Rencana Strategisnya mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung RI, yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang tidak lepas dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

VISI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK adalah :
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak Yang Agung”

MISI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK ADALAH :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak.

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah memerlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan Rencana Strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang modern, yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta dapat tegaknya supremasi hukum.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan strategi adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak harus didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana yang cukupserta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan

Negeri Pontianak Kelas 1A baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

1. TUJUAN STRATEGIS

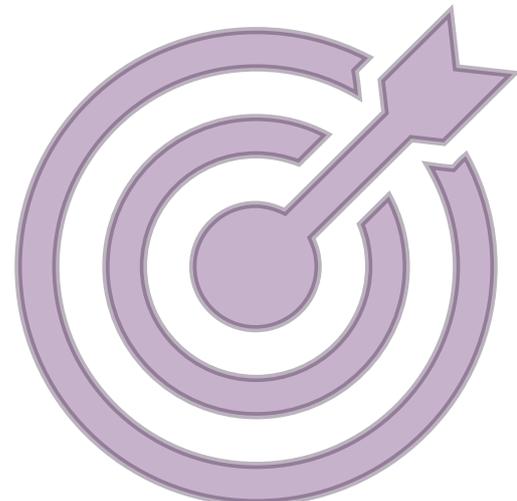
Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan yang secara garis besar ditetapkan sebagai berikut:

- a.** Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan;
- b.** Efektivitas Pelayanan Badan Peradilan;
- c.** Peningkatan kepastian hukum dan transparansi pelayanan publik.

2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran strategis Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, yaitu:

- a.** Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- b.** Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- c.** Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- d.** Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
- e.** Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;
- f.** Peningkatan Manajemen Peradilan Umum



BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)



A. KEADAAN PERKARA TAHUN 2023

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, perlu dilakukan suatu penilaian sampai sejauh mana capaian penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Selama tahun 2023, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah berhasil menyelesaikan 3.182 perkara dari total 3.337 perkara dan dalam presentase penyelesaiannya adalah 95,35%. Berikut matriks keadaan perkara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A pada tahun 2023.

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

NO.	JENIS PERKARA	SISA 2022	MASUK	PUTUS	RASIO PENANGANAN PERKARA	SISA
1.	Perdata Gugatan/Bantahan	55	325	294	77,37%	86
2.	Perdata Gugatan Sederhana	-	35	34	97,14%	1
3.	Perdata Permohonan	-	910	909	99,89%	1
4.	Perdata PHI	11	45	47	83,93%	9
5.	Pidana Biasa	34	697	679	92,89%	52
6.	Pidana Pra Peradilan	-	5	3	60,00%	2
7.	Pidana Cepat	-	15	15	100,00%	-
8.	Pidana Lalu Lintas	-	1.115	1.115	100,00%	-
9.	Pidana Anak	-	12	12	100,00%	-
10.	Pidana Perikanan	-	8	8	100,00%	-
11.	Pidana Tipikor	16	54	66	94,29%	4

Tabel 1 Data keadaan Perkara Tingkat Pertama diambil dari SIPP PN Pontianak

2. KEADAAN PERKARA BANDING

NO.	JENIS PERKARA	SISA 2022	MASUK	PUTUS	RASIO PENANGANAN PERKARA	SISA
1.	Perdata Gugatan / Bantahan	10	43	37	112,12%	16
2.	Perlawanan / Bantahan	1	8	3	42,86%	6
3.	Perdata Permohonan	-	-	-	-	-
4.	Perdata PHI	-	-	-	-	-
5.	Pidana Biasa	6	46	39	97,50%	13
6.	Pidana Pra Peradilan	1	-	-	0,00%	1
7.	Pidana Cepat	-	-	-	-	-
8.	Pidana Lalu Lintas	-	-	-	-	-
9.	Pidana Anak	1	1	2	0,00%	-
10.	Pidana Perikanan	1	1	2	0,00%	-
11.	Pidana Tipikor	3	17	17	121,43%	3

Tabel 2 Data keadaan Perkara Banding diambil dari SIPP PN Pontianak

3. KEADAAN PERKARA KASASI

NO.	JENIS PERKARA	SISA 2022	MASUK	PUTUS	RASIO PENANGANAN PERKARA	SISA
1.	Perdata Gugatan / Bantahan	48	24	18	25,00%	54
2.	Perlawanan / Bantahan	2	3	3	60,00%	2
3.	Perdata Permohonan	-	-	-	-	-
4.	Perdata PHI	14	25	18	46,15%	21
5.	Pidana Biasa	18	26	21	47,73%	23
6.	Pidana Pra Peradilan	-	-	-	-	-
7.	Pidana Cepat	-	-	-	-	-
8.	Pidana Lalu Lintas	-	-	-	-	-
9.	Pidana Anak	2	1	1	33,33%	2
10.	Pidana Perikanan	-	-	-	-	-
11.	Pidana Tipikor	8	20	12	42,86%	16

Tabel 3 Data keadaan Perkara Kasasi diambil dari SIPP PN Pontianak

4. KEADAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

NO.	JENIS PERKARA	SISA 2022	MASUK	PUTUS	RASIO PENANGANAN PERKARA	SISA
1.	Perdata Gugatan/Bantahan	10	8	5	27,78%	13
2.	Perlawanan / Bantahan	-	-	-	-	-
3.	Perdata Permohonan	-	-	-	-	-
4.	Perdata PHI	2	-	-	0,00%	2
5.	Pidana Biasa	7	2	3	33,33%	6
6.	Pidana Pra Peradilan	-	-	-	-	-
7.	Pidana Cepat	-	-	-	-	-
8.	Pidana Lalu Lintas	-	-	-	-	-
9.	Pidana Anak	-	-	-	-	-
10.	Pidana Perikanan	-	-	-	-	-
11.	Pidana Tipikor	3	3	5	83,33%	1

Tabel 4 Data Perkara Peninjauan Kembali diambil dari SIPP PN Pontianak

B. PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2023

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Jumlah sisa perkara yang diputus merupakan sisa perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2023.

NO.	JENIS PERKARA	SISA
1.	Perdata Gugatan/Bantahan	86
2.	Perdata Gugatan Sederhana	1
3.	Perdata Permohonan	1
4.	Perdata PHI	9
5.	Pidana Biasa	52
6.	Pidana Pra Peradilan	2
7.	Pidana Cepat	-
8.	Pidana Lalu Lintas	-
9.	Pidana Anak	-
10.	Pidana Perikanan	-
11.	Pidana Tipikor	4

Tabel 5 Data Sisa Perkara yang diputus diambil dari SIPP PN Pontianak

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Jumlah perkara yang diputus dan disajikan adalah data perkara yang masuk, diputus dan diselesaikan secara tepat waktu di tahun 2023.

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH
1.	Perdata Gugatan	239
2.	Perdata Gugatan Sederhana	16
3.	Perdata Permohonan	537
4.	Perdata PHI	9
5.	Pidana Biasa	641
6.	Pidana Pra Peradilan	5
7.	Pidana Cepat	15
8.	Pidana Lalu Lintas	1.115
9.	Pidana Anak	12

10.	Pidana Perikanan	8
11.	Pidana Tipikor	27

Tabel 6 Data Perkara yang diputus tepat waktu diambil dari SIPP PN Pontianak

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

NO.	JENIS PERKARA	BANDING	KASASI	PK
1.	Perdata Gugatan	243	267	286
2.	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-
3.	Perdata Permohonan	-	-	-
4.	Perdata PHI	-	22	-
5.	Pidana Biasa	633	653	677
6.	Pidana Pra Peradilan	-	-	-
7.	Pidana Cepat	-	-	-
8.	Pidana Lalu Lintas	-	-	-
9.	Pidana Anak	11	11	-
10.	Pidana Perikanan	7	-	-
11.	Pidana Tipikor	49	65	63

Tabel 7 Data Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali diambil dari SIPP PN Pontianak

4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MEDIASI

Untuk perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Pontianak pada Tahun 2023 telah dilakukan Mediasi sebanyak 148 perkara, dengan rincian sebagai berikut;

NO.	SATKER	JUMLAH MEDIASI	BERHASIL
1.	Pengadilan Negeri Pontianak	148	7

Tabel 8 Data Perkara Perdata yang dilakukan Mediasi

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Untuk perkara Pidana Khusus Anak di Pengadilan Negeri Pontianak telah dilakukan Diversi sebanyak 4 perkara, dan yang berhasil dengan Diversi sebanyak 0 perkara;

NO.	SATKER	JUMLAH DIVERSI	BERHASIL
1.	Pengadilan Negeri Pontianak	4	0

Tabel 9 Data Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

1. POSBAKUM (POS PELAYANAN HUKUM)

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, diantaranya berupa :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan Negeri Pontianak.

Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2023 mempunyai 1 (satu) Posbakum yaitu : LKKBH Universitas Panca Bahkti, sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Pontianak dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Januari 2023;

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A pada tahun 2023 dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.2.099239/2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Anggaran dengan mata anggaran 1049.QBA untuk Posbakum sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) yang diperuntukan untuk Layanan Pengacara Piket dengan perhitungan 120 Orang x 4 Jam Layanan.

NO	JENIS LAYANAN	JENIS KELAMIN PEMOHON LAYANAN				WAKTU LAYANAN DALAM JAM	REALISASI ANGGARAN	JUMLAH ORANG LAYANAN
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN				
		DIFABEL	NON DIFABEL	DIFABEL	NON DIFABEL			
1	Konsultasi Hukum	-	102	-	89	480	48.000.000	
2	Pembuatan Dokumen Hukum	-	-	-	-	-	-	
3	Penyediaan Informasi organisasi bantuan hukum	-	-	-	-	-	-	

Tabel 10 Data Layanan Posbakum PN Pontianak

2. SIDANG KELILING / PELAYAN TERPADU

Sidang keliling merupakan sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi, dan biaya. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A pada tahun 2023 dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.2.099239/2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Anggaran dengan mata anggaran 1049.QCA untuk Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan sudah direalisasikan sepenuhnya atau 100% untuk layanan Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Pembebasan biaya perkara adalah salah satu program yang diselenggarakan oleh seluruh badan peradilan di Indonesia karena merupakan program nasional, dan bentuk reformasi bidang hukum sebagaimana yang termuat dalam cetak biru Mahkamah Agung RI. Sebagai dukungan atas program tersebut maka Pengadilan



Negeri Pontianak Kelas 1A pada tahun 2023 dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.2.099239/2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp 1.340.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan sudah direalisasikan sepenuhnya atau 100% untuk Prodeo.

D. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Akreditasi (acreditation) adalah mendapat pengakuan/penilaian dari lembaga yang berwenang atau secara umum dikenal di masyarakat internasional adalah Standar Sertifikasi ISO 9001 : 2015 yaitu standar internasional di bidang sistem manajemen mutu dalam suatu organisasi seperti pengadilan. Akreditasi pengadilan dapat diartikan sebagai pengakuan resmi dari pemerintah kepada pengadilan tersebut yang telah memenuhi syarat standar pelayanan terhadap pencari keadilan atau pengguna jasa pengadilan.

Akreditasi pengadilan diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu suatu pengadilan dengan penetapan standar-standar mutu pelayanan dan wajib di *surveillance* 6 (enam) bulan sekali dalam 3 tahun penilaian.

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO9001:2008, diperkaya dengan penerapan *International Frame Work For Court Excellent*, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemeintah, maka Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor

58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan 4 (empat) Badan Peradilan dibawahnya.

Sebagai implementasi Surat Keputusan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak selaku salah satu satker dibawah Mahkamah Agung R.I telah ditetapkan sebagai salah satu satker Mandatori yang diusulkan untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dan untuk itu Pengadilan Negeri Pontianak telah melakukan pembangunan Zona Integritas sejak awal tahun 2019 dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan RB pada 13 November 2020 dan telah berhasil mempertahankan yang dibangun sehingga berhasil mendapat Apresiasi Piagam Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan menuju WBBM dari Kemenpan Reformasi Birokrasi R.I.



Gambar 1 Piagam Penghargaan Predikat WBK PN Pontianak

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA



Sumber daya manusia yaitu salah satu faktor yang penting dan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan penentu perkembangan instansi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan dalam sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuannya.

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

1. MUTASI

Pada tahun 2023, terdapat 13 (tiga belas) orang Personil yang mutasi masuk pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, dengan penjelasan sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Dr UKAR PRIYAMBODO, S.H., M.H.		Hakim Ad Hoc Tipikor PN Pontianak
2.	NURMANSYAH, S.H., M.H.		Hakim Ad Hoc Tipikor PN Pontianak
3.	ARIF HENDRIANA, S.H.,M.H.		Hakim Ad Hoc Tipikor PN Pontianak

4.	ARIES SAPUTRO, S.H.,M.H.		Hakim Ad Hoc Tipikor PN Pontianak
5.	SYAHRIR RIZA, S.H.	Panitera Muda Pidana PN. Pontianak	Panitera Muda Perdata Pontianak
6.	FERRI YANUARDI, S.H.	Panitera Muda Khusus Perikanan PN. Pontianak	Panitera Muda Pidana PN. Pontianak
7.	ARI, S.H	Panitera Muda Pidana PN. Bengkayang	Panitera Muda Khusus Perikanan PN. Pontianak
8.	SRIYANTI TIO DENTA SITUMORANG, S.H.	CPNS PN. Pontianak	PNS PN. Pontianak
9.	RADEN RORO SITI NUR ROCHMAH, S.H.	CPNS PN. Pontianak	PNS PN. Pontianak
10.	ANINDYA LARASATI, S.H.	CPNS PN. Pontianak	PNS PN. Pontianak
11.	SRI RAHMAWATI, A.Md.	CPNS PN. Pontianak	PNS PN. Pontianak
12.	ERNA NURHIDDIYANTI NOVITA DEWI, A.Md	CPNS PN. Pontianak	PNS PN. Pontianak
13.	LISA ENDAH FATAYANI, A.Md	CPNS PN. Pontianak	PNS PN. Pontianak

Tabel 11 Data Personil yang masuk pada PN Pontianak

2. PROMOSI

Pada tahun 2023, terdapat 9 (Sembilan) orang Pegawai yang mutasi/ promosi pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, dengan penjelasan sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.	Hakim Madya Muda PN. Pontianak	Hakim Madya Muda PN. Sleman
2.	ASIH WIDIASTUTI, S.H.	Hakim Madya Muda PN. Pontianak	Hakim Madya Muda PN. Ungaran
3.	RENDRA, S.H., M.H.	Hakim Madya Muda PN. Pontianak	Hakim Madya Muda PN. Serang
4.	MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H	Hakim Madya Muda PN. Pontianak	Hakim Madya Muda PN. Serang
5.	MOCH. NUR AZIZI, S.H.	Hakim Madya Muda PN. Pontianak	Hakim Madya Muda PN. Bekasi
6.	WURYANTI, S.H., M.H.	Hakim Madya Muda PN. Pontianak	Wakil Ketua PN. Sambas
7.	KURNIA DIANTA GINTING, S.H. M.H.	Hakim Madya Muda PN. Pontianak	Hakim Madya Muda PN. Makassar

8.	DEWI APRIYANTI, S.H., M.H	Hakim Madya Muda PN. Pontianak	Hakim Madya Muda PN. Cibinong
9.	SYUAIDI, S.H.	Panitera Muda Perdata PN. Pontianak	Panitera Muda PT. Pontianak
10.	IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum PN. Pontianak	Panitera Muda PT. Pontianak

Tabel 12 Data Pegawai yang promosi pada PN Pontianak

3. KENAIKAN PANGKAT PER APRIL / OKTOBER

Pada tahun 2023, terdapat 9 (sembilan) orang Pegawai yang naik Pangkat per April/Oktober pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, dengan penjelasan sebagai berikut :

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOL.RUANG	KENAIKAN PANGKAT	JENIS KENAIKAN PANGKAT
1.	TRI RETNANINGSIH, S.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	Pembina Utama Muda (IV/c)	Reguler
2.	WURYANTI, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Pembina Tk. I (IV/b)	Reguler
3.	DENY IKHWAN, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Pembina Tk. I (IV/b)	Reguler
4.	UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, S.H., M.H	Pembina (IV/a)	Pembina Tk. I (IV/b)	Reguler
5.	DEWI APRIYANTI, S.H., M.H	Pembina (IV/a)	Pembina Tk. I (IV/b)	Reguler
6.	KURNIA DIANTA GINTING, S.H. M.H	Pembina (IV/a)	Pembina Tk. I (IV/b)	Reguler
7.	YUNIAR NELLY, S.T., M.M	Pembina (IV/a)	Pembina Tk. I (IV/b)	Reguler
8.	KUSUMA AGUS CAHYONO, S.H.	Penata (III/c)	Penata Tk. I (III/d)	Reguler
9.	RIRIN ZUAMA RB HUTAGALUNG, S.H.	Penata (III/c)	Penata Tk. I (III/d)	Reguler

Tabel 13 Data Pegawai PN Pontianak yang naik Pangkat per April / Oktober pada tahun 2023

4. PEGAWAI YANG PENSIUN

Pada tahun 2023, ada Pegawai yang pensiun pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	TMT Pensiun
1.	RIBUT SUPRIADI S.Sos.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	01 Juli 2023

Tabel 14 Data Pegawai PN Pontianak yang Pensiun pada tahun 2023

5. DIKLAT (SDM TEKNIS / NON TEKNIS)

NO.	JENIS DIKLAT TEKNIS	NAMA PESERTA
1.	Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan Tahun 2023 tanggal 08 Februari 2023	- Syuaidi, S.H. - Raden Roro Siti Nur Rochmah, S.H.
2.	Pelatihan Sertifikasi hakim Perikanan bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia Tahap I tanggal 27 Februari 2023 s/d 3 Maret 2023 Online materi Tahap II tanggal 6 s/17 Maret 2023 Klasikal	Joko Waluyo, S.H., Sp.NOT., M.M.
3.	Pelatihan Sertifikasi Perikanan bagi Hakim seluruh Indonesia tanggal 16 februari 2023	- Sri Harsiwi, S.H., M.H. - Rendra, S.H., M.H. - Joko Waluyo, S.H., Sp.NOT., M.M.
4.	Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahap I tanggal 27 Februari s/d 3 Maret 2023 Pembelajaran Mandiri E-Learning Tahap II tanggal 5 s/d 11 Maret 2023 Pembelajaran Tatap Muka Klasikal	Retno Lastiani, S.H., M.H.
5.	Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan Terhadap Keadilan Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tahap I tanggal 6 s/d 10 Maret 2023 Pembelajaran Mandiri e-Learning Tahap II tanggal 12 s/d 18 Maret 2023 Pembelajaran Tatap Muka Klasikal	Wuryanti, S.H., M.H.
6.	Pelatihan Sertifikasi Perikanan bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia, tanggal 12 Maret 2023	Joko Waluyo, S.H., Sp. NOT., M.M.
7.	Konferensi IAWJ Biennial Conference 2023 secara Mandiri dan Survey Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Hakim Perempuan tanggal 14 April 2023	- Sri Harsiwi, S.H., M.H. - Tri Retnaningsih, S.H., M.H. - Wuryanti, S.H., M.H.

8.	<p>Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bagi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc PHI Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tahap I tanggal 10 s/d 18 April 2023 Pembelajaran e-Learning Tahap II tanggal 1 s/d 16 Mei 2023 Pembelajaran Tatap Muka Klasikal</p>	<p>Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.</p>
9.	<p>Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bagi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc PHI Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tahap I tanggal 10 s/d 18 April 2023 Pembelajaran e-Learning Tahap II tanggal 1 s/d 16 Mei 2023 Tahap II tanggal Pembelajaran Tatap Muka Klasikal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herianto Sinaga, S.H. - Prana Jaya, S.H.
10.	<p>Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara Tahap I tanggal 29 s/d 30 April 2023 secara online Tahap II tanggal 1 s/d 12 Mei 2023 secara tatap muka</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Raden Roro Siti Nur Rochmah, S.H. - Anindya Larasati, S.H. - Sriyanti Tio Denta Situmorang, S.H.
11.	<p>Kegiatan Penyusunan Hubungan Tata Cara Kerja Penyelenggaraan Karantina Ikan dan Penegakkan Hukum Tanggal 5 s/d 7 Juni 2023</p>	<p>Dr. Urif Syarifudin, A.Pi., M.T.</p>
12.	<p>Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH Studi Kasus Laporan Masyarakat Di Komisi Yudisial Tanggal 06 s/d 09 Juni 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Retno Lastiani, S.H., M.H. - Wuryanti, S.H., M.H. - Dewi Apriyanti, S.H., M.H. - Kurnia Dianta Ginting, S.H. M.H
13.	<p>Pedoman Pemindaahan Pasal-pasal Tertentu dalam Undang-undang Narkotika Tanggal 21 Juli 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Retno Lastiani, S.H., M.H. - Deny Ikhwan, S.H., M.H.
14.	<p>Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 Tanggal 23 s/d 25 Agustus 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> - H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H. - Tri Retnaningsih, S.H. - Joko Waluyo, S.H., Sp.NOT., M.M - Yamti Agustina, S.H. - Retno Lastiani, S.H., M.H. - Wuryanti, S.H., M.H. - Kurnia Dianta Ginting, S.H. M.H - Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

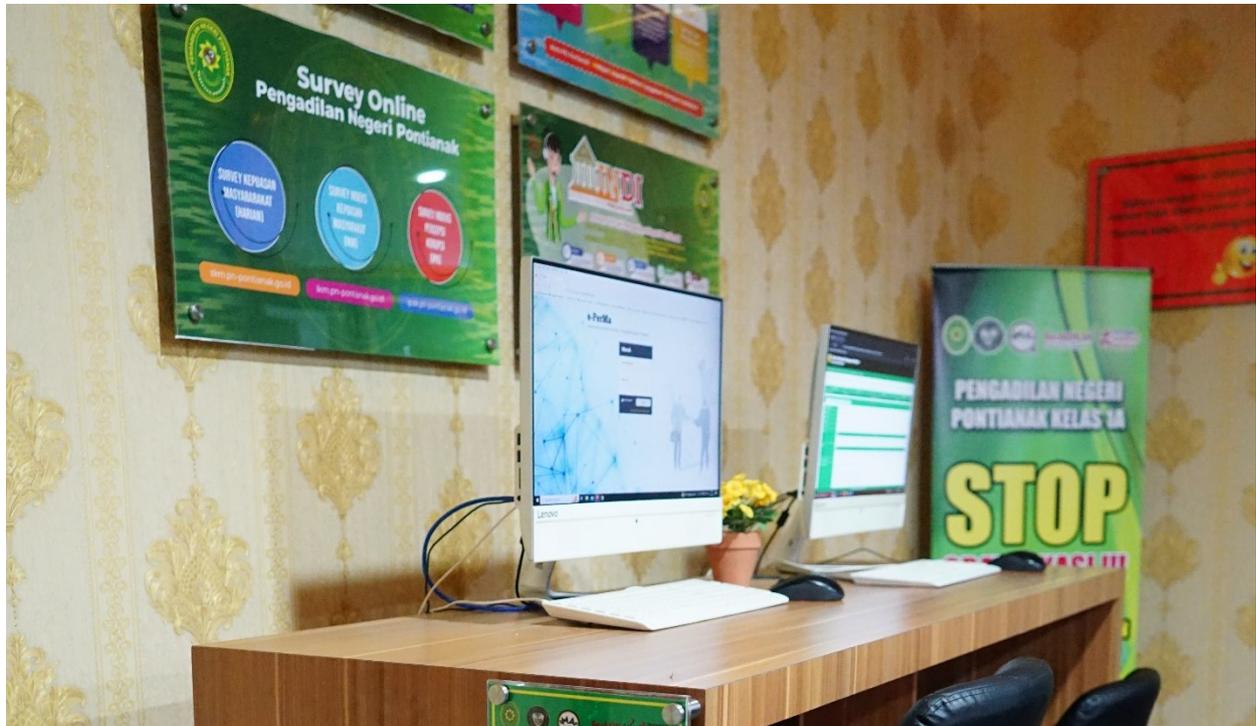
		- Muhammad Zainul Rahman, S.Kom. - Chorry Iga Setyaningrum, A.Md
15.	Sosialisasi Penggunaan Rekening Virtual untuk Pembayaran Biaya Perkara dan Kebijakan Penanganan Perkara Tanggal 14 September 2023	- Deny Ikhwan, S.H., M.H. - Utin Reza Putri, S.H., M.H - Salmah
16.	Pemanggilan Peserta Lokakarya Penggunaan Cybertipline National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) dalam Penyelidikan, Penuntutan, dan Agunikasi Kasus Kejahatan Internet Terhadap Anak (ICAC) Tanggal 24 s/d 28 September 2023	Moch. Nur Azizi, S.H.
17.	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Gelombang III bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tanggal 13 s/d 17 November 2023 tanggal 19 November s/d 02 Desember 2023	Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H

NO.	JENIS DIKLAT NON TEKNIS	NAMA PESERTA
1.	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP) Angkatan I dan II Wilayah Kalimantan dari Tempat Tugas Tahun 2023, tanggal 24 Februari 2023	Yuniar Nelly, S.T., M.M.
2.	Workshop Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Tanggal 10 April s/d 11 April 2023 secara online	- Yuniar Nelly, S.T., M.M - Fitriyani
3.	Workshop Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Tanggal 10 April s/d 11 April 2023 secara online	Lily Widyanti, S.E.
4.	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Wilayah Kalimantan Barat Tahap I tanggal 8 Mei s/d 23 Mei 2023 secara online Tahap II tanggal 25 Mei s/d 27 Mei 2023 secara tatap muka di BPSDM Kalimantan Barat	Lisa Endah Fatayani, A.Md.
5.	Bimtek Aplikasi SAKTI Tanggal 25 Mei 2023	Ratna Marhamah Harahap, S.H.

6.	Pelatihan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanggal 25 Mei 2023	Lisa Endah Fatayani, A.Md
7.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Bekerjasama Dengan Diklat PKN BPK RI Tanggal 29 s/d 31 Mei 2023	Yuniar Nelly, S.T., M.M.
8.	Sosialisasi Hasil Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif DIPA 03 TA 2024 Di Wilayah Pengadilan Tinggi Pontianak Tanggal 31 Mei 2023	Fitriyani
9.	Bimtek Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 Tanggal 12 Juni 2023	Lily Widyanti, S.E.
10	Pelatihan Menejemen dan Kepemimpinan tanggal 4 s/d 10 Juli 2023	Anindya Larasati, S.H.
11.	Pelatihan Bela Negara Tanggal 10 s/d13 Juli 2023	Anindya Larasati, S.H.
12.	Pelatihan Online Majemen ASN Angkatan III s.d V Tanggal 11 Agustus 2023 s/d tanggal 11 September 2023 secara Online.	Sri Rahmawati, A.Md.
13.	Kegiatan Inventarisasi Data BMN pada Wilayah Kalimantan Barat Tanggal 05 s/d 08 September 2023	- Yuniar Nelly, S.T., M.M - Lily Widyanti, S.E. - Lisa Endah Fatayani, A.Md
14.	Pemanggilan Bimtek Peserta Orientasi PPPK dengan lembaga Administrasi Negara (IAN) Daring melalui learning melalui learning management sytem (LMS) atau e-Learning management Tanggal 25-09-2023 s/d 13-10-202317 s/d 25 Oktober 2023	Syafi'i, A.Md.A.B.
15.	Sosialisasi Perdirjen PER-8/PB/2023 dan Penyusunan Laporan Keuangan Trieulan III Tahun 2023 Tanggal 10 Oktober 2023	- Lily Widyanti, S.E. - Lisa Endah Fatayani, A.Md
16.	Bimtek Rencana Program dan Anggaran Satuan Kerja Peradilan Umum Tanggal 04 s/d 06 Desember 2023	- Yuniar Nelly, S.T., M.M - Fitriyani - Lisa Endah Fatayani, A.Md
17.	Pemanggilan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tanggal 17 s/d 20 Desember 2023	- Fitriyani

Tabel 15 Data Pegawai PN Pontianak yang mengikuti Diklat Teknis / Non Teknis

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI



A. PENGELOLAAN KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN TEKNIS DAN NON TEKNIS)

Pada Tahun 2023 ini, Pengadilan Negeri Pontianak mendapatkan pagu anggaran dari DIPA Badan Urusan Administrasi sebesar Rp14.579.993.000.00 (empat belas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan alokasi untuk belanja pegawai sebesar Rp12.243.299.000.00 (Dua belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), belanja barang sebesar Rp2.323.524.000.00 (Dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan optimalisasi belanja tambahan modal sebesar Rp218.200.000.00 (Dua ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) serta dari pagu anggaran DIPA Dirjen Badilum sebesar Rp498.300.000.00 (Empat ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alokasi untuk belanja barang;

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - ❖ Layanan Umum
 - Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah
 - ❖ Layanan Perkantoran
 - Gaji dan Tunjangan
 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.
Layanan Sarana Internal
 - ❖ Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - Layanan Sarana Internal
 - Layanan Prasarana Internal

a. Belanja Pegawai (dilampirkan matrik terlampir)

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	11.766.753.000	11.199.898574	566.854.426	95.18%

Tabel 16 Rekapitulasi Belanja Pegawai pada PN Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat

b. Belanja Barang Operasional (dilampirkan matrik terlampir)

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	2.304.084.000	2.283.697.208	20.386.792	99.12%

Tabel 17 Rekapitulasi Belanja Barang Operasional pada PN Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat

c. Belanja Modal (dilampirkan matrik terlampir)

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	218.200.000	218.200.000	0	100%

Tabel 18 Rekapitulasi Belanja Modal pada PN Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat

d. Belanja Non Operasional Dipa Badilum (dilampirkan matrik terlampir)

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	498.300.000	497.551.000	749.000	99.85%

Tabel 19 Rekapitulasi Belanja Barang Non Operasional Pada PN Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. PENGADAAN

Pengadaan Sarana Internal Fasilitas Perkantoran pada Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pengadaan Peralatan dan Mesin berupa meja kerja 1 biro sebanyak 11 (sebelas) unit pada Gedung Pengadilan Negeri Pontianak.

Pengadaan Prasarana Internal Renovasi Gedung Kantor terdiri dari belanja penambahan nilai Gedung dan bangunan seluas 127 m² pada Gedung Pengadilan Negeri Pontianak.

2. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG

Untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun Anggaran 2023 terdiri dari pemeliharaan :

- ❖ Gedung Pengadilan Negeri, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan halaman.
- ❖ Rumah Dinas.
- ❖ Peralatan dan Mesin (Genset, Kendaraan Roda Empat, roda dua, PC, Printer, AC split, Laptop, Inventaris kantor dan genset).

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I						
Jenis Kendaraan Roda 4						
1	Sedan	2005	√			
2	Sedan	2006	√			
3	Minibus	2001		√		
4	Minibus	2011	√			
5	Minibus	2018	√			
II						
Jenis Kendaraan Roda 2						
1	MegaPro	2007	√			
2	MegaPro	2011	√			

3	Supra X-125	2013	√
4	Supra X-125	2013	√

Tabel 20 Matrik kendaraan dinas

RUMAH DINAS						
NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua	1	1			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1			
3	Rumah Dinas Hakim	10	10			
4	Rumah Dinas Panitera	1	1			
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	1			

Tabel 21 Matrik keadaan Rumah Dinas

NO	SARANA/PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	KETERANGAN
I	Sarana / Prasarana Ruang		
1	Ruang Ketua	1	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Hakim	1	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang Umum	5	Baik
7	Ruang Sidang Anak	1	Baik
8	Ruang Mediasi/Diversi	1	Baik
9	Ruang Tunggu Anak	1	Baik
10	Perpustakaan	1	Baik
11	Ruang Arsip Perkara	1	Baik

12	Ruang Tahanan Pria Dewasa	1	Baik
13	Ruang Tahanan Wanita Dewasa	1	Baik
14	Ruang Aula	1	Baik
II	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Stationary Generating Set	2	2 Baik
2	Scanner (Universal Tester)	1	1 Baik
3	Cermin Besar	4	4 Baik
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	15	1 Baik, 14 Rusak Ringan
5	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	9	9 Rusak Ringan
6	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	2	2 Rusak Ringan
7	Lemari Besi/Metal	47	44 Baik, 3 Rusak Ringan
8	Lemari Kayu	12	3 Baik, 9 Rusak Ringan
9	Rak Besi	22	10 Baik, 12 Rusak Ringan
10	Rak Kayu	2	2 Baik
11	Filing Cabinet Besi	41	37 Baik, 4 Rusak Ringan
12	Brandkas	2	2 Baik
13	Buffet	1	1 Rusak Ringan
14	CCTV - Camera Control Television System	4	Baik
15	Papan Visual/Papan Nama	24	12 Baik, 12 Rusak Ringan
16	Mesin Absensi	2	2 Baik
17	Mesin Antrian	1	1 Baik
18	Alat Kantor Lainnya (Penunjang Disabilitas)	1	1 Baik
19	Meja Kerja Besi/Metal	2	2 Baik
20	Meja Kerja Kayu	104	92 Baik, 12 Rusak Ringan
21	Kursi Besi/Metal	216	194 Baik, 22 Rusak Ringan
22	Kursi Kayu	73	68 Baik, 5 Rusak Ringan
23	Sice	10	10 Baik
24	Bangku Panjang Besi/Metal	10	10 Baik
25	Bangku Panjang Kayu	36	36 Baik

26	Meja Rapat	3	3 Baik
27	Meja Komputer	17	17 Baik
28	Meja Resepsionis	1	1 Baik
29	Sketsel	9	9 Baik
30	Gantungan Jas	4	4 Rusak Ringan
31	Meubelair Lainnya	5	5 Baik
32	Jam Mekanis	4	4 Baik
33	Jam Elektronik	1	1 Rusak Ringan
34	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	1 Baik, 1 Rusak Ringan
35	Lemari Es	1	1 Baik
36	A.C. Split	51	39 Baik 12 Rusak Ringan
37	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	1 Baik
38	Kipas Angin	21	21 Rusak Ringan
39	Exhause Fan	6	6 Baik
40	Televisi	5	5 Baik
41	Loudspeaker	13	13 Baik
42	Sound System	3	2 Baik, 1 Rusak Ringan
43	Microphone	8	8 Baik
44	Microphone Table Stand	9	9 Baik
45	Lambang Garuda Pancasila	3	3 Baik
46	Gambar Presiden/Wakil Presiden	6	2 Baik, 4 Rusak Ringan
47	Tiang Bendera	13	4 Baik, 9 Rusak Ringan
48	Kaca Hias	2	2 Rusak Ringan
49	Dispenser	4	4 Baik
50	Palu Sidang	5	5 Baik
51	Lambang Instansi	2	2 Baik
52	Asbak Tinggi	9	4 Baik, 5 Rusak Ringan
53	Bingkai Foto	2	2 Baik
54	Bracket Standing Peralatan	3	3 Baik
55	Audio Mixing Console	2	2 Baik
56	Audio Mixing Portable	1	1 Baik
57	Audio Mixing Stationer	1	1 Baik
58	Microphone/Wireless MIC	6	6 Baik
59	Microphone/Boom Stand	2	2 Baik
60	Uninterruptible Power Supply (UPS)	30	21 Baik, 9 Rusak Ringan
61	Tripod Camera	1	1 Baik
62	Camera Digital	1	1 Baik

63	LCD Monitor	1	1 Baik
64	Camera Conference	4	4 Baik
65	Telephone (PABX)	2	2 Baik
66	Pesawat Telephone	17	17 Baik
67	Facsimile	2	2 Baik
68	Network Monitoring System	2	2 Baik
69	Komputer Jaringan Lainnya	1	1 Baik
70	P.C Unit	64	62 Baik, 2 Rusak Ringan
71	Lap Top	26	24 Baik, 2 Rusak Ringan
72	Note Book	4	4 Baik
73	Printer (Peralatan Personal Komputer)	53	22 Baik, 31 Rusak Ringan
74	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	6 Baik
75	Peralatan Personal Komputer Lainnya	7	2 Baik, 5 Rusak Ringan
76	Server	2	2 Baik
77	Router	1	1 Baik
78	Hub	1	1 Baik
79	Rak Server	1	1 Baik
80	Closed Circuit Television (CCTV)	1	1 Baik
81	Meja kerja 1 biro	11	Baik

Tabel 22 Matrik keadaan Sarana / Prasarana

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. IMPLEMENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A

Paska Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem e-court sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan.

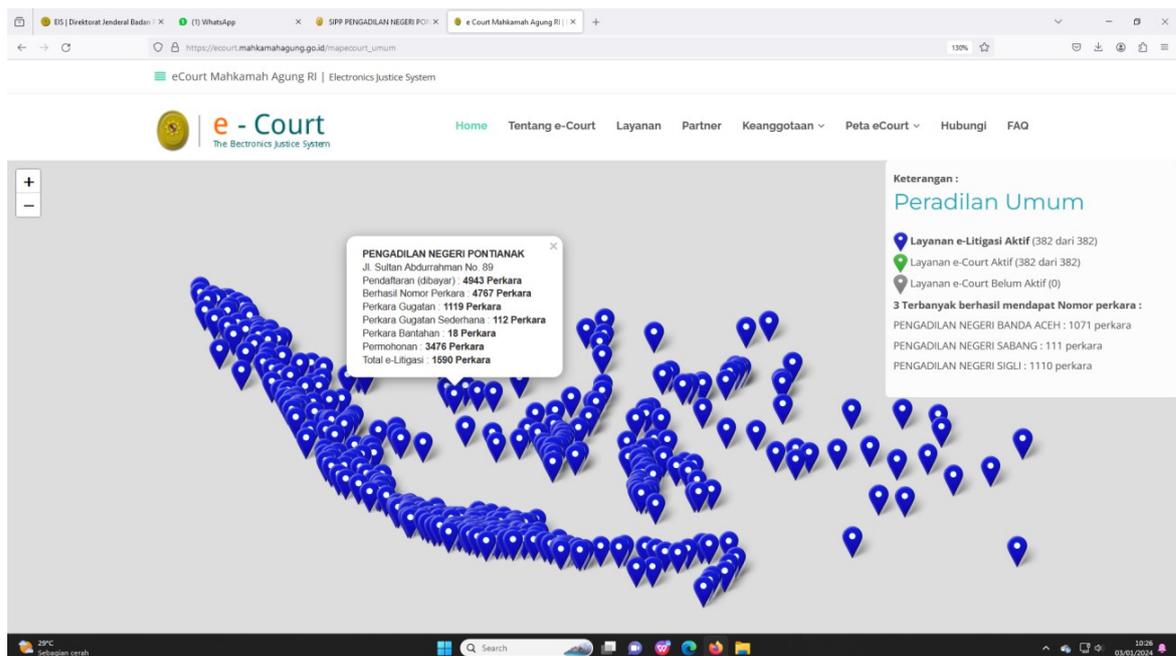
Pada tanggal 6 Agustus 2019, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan peraturan tersebut nantinya proses peradilan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Litigasi.

Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019, dengan aplikasi e-Litigasi merupakan kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara.

Pada sistem e-court sebelumnya, sistem elektronik atau online hanya dilakukan pada administrasi negara atau pendaftaran. Selain itu, sistem elektronik juga tidak hanya diberlakukan pada pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara dan biaya pemanggilan tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik, e-Litigasi juga memperluas cakupan pengguna data peradilan secara elektronik.

Pemberlakuan e-Litigasi untuk persidangan di tingkat pertama juga diikuti dengan pemanfaatan e-court untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan Kembali terhadap perkara yang menggunakan e-Litigasi pada tingkat pertama.



Gambar 2 Peta e-Court PN Pontianak

Sampai dengan tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sudah menerapkan E-Court dengan jumlah pendaftaran perkara melalui Ecourt yaitu perkara Perdata Gugatan berjumlah 1119 perkara, perkara Perdata Gugatan Sederhana berjumlah 112 perkara, Perkara Bantahan 18 perkara. Perkara Permohonan berjumlah 3476 perkara dan Total perkara menggunakan E-litigasi berjumlah 1590 perkara.

Sebagai wujud komitmen Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dalam penerapan e-Litigasi, maka pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A mendapat penghargaan Lomba E-Litigasi Peringkat III kategori Satuan Kerja Dengan Perkara diatas 1000.



Gambar 3 Piagam Penghargaan Lomba E-Litigasi Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

2. IMPLEMENTASI E-BERPADU DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Pengeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan



menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Permohonan Penangguhan Penahanan

Sampai dengan tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A sudah menerapkan E-Berpadu dengan jumlah pendaftaran perkara melalui E-Berpadu yaitu perkara Pidana Umum berjumlah 1119 perkara, perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi berjumlah 112 perkara, Perkara Pidana Perikanan berjumlah 18 perkara dan Total perkara menggunakan E-Berpadu berjumlah 1590 perkara.



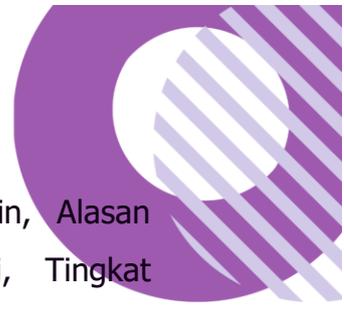
Gambar 4 Capture Aplikasi e-Berpadu

3. IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di setiap satuan kerja. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Dalam tahun 2022 SIPP mengalami 3 (tiga) kali pembaharuan versi dari 5.2.0, 5.3.0 dan 5.3.1.

Dengan format SIPP versi dari 5.2.0, terdapat fitur – fitur baru yaitu :

- 5.2.0 Perbaikan pada Jurnal Eksekusi untuk memperbaiki Pesan Error Code Error 194
- 5.2.0 Umum/Agama (MS) : Perbaikan pada modul integrasi SIPP e-Berpadu
- 5.2.0 TUN : Pendaftaran PILKADA melalui e-Court
- 5.2.0 TUN : Pendaftaran Perlawanan Dismissal melalui e-Court
- 5.2.0 TUN : Penambahan kolom saran perbaikan gugatan di SIPP
- 5.2.0 Agama : Perekaman data Wakaf, Mempelai, Anak, Alasan Nikah



- 5.2.0 Agama : Penambahan Referensi Opsi pada Pembatalan Kawin, Alasan Penguasaan Anak, Pengesahan Anak, Pelaksanaan Eksekusi, Tingkat Pendidikan, Obyek Wakaf, Ijin Poligami, Istbat Nikah.
- 5.2.0 Agama : Penambahan fitur eksekusi Anak
- 5.2.0 Umum : Pendaftaran konsinyasi melalui e-Court
- 5.2.0 Umum/Agama : Pendaftaran Pembatalan Arbitrase/Arbitrase Syariah melalui e-Court
- 5.2.0 Umum/Agama : Pendaftaran Verzet melalui e-Court
- 5.2.0 Umum/Agama/TUN : Permohonan berperkara dengan pembebasan biaya perkara melalui e-Court
- 5.2.0 Umum/Agama/TUN : Pengisian Surat Tercatat pada Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Putusan
- 5.2.0 Anonimasi data sesuai dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan pada SIPP Web
- 5.2.0 Perbaikan paginasi halaman pada SIPP Web
- 5.2.0 Penyesuaian tampilan detil informasi pada fitur eksekusi
- 5.2.0 Penambahan referensi KUA seluruh Indonesia pada inputan Nama KUA Perkara Cerai dan Itsbat Nikah
- 5.2.0 Umum/MS : Perbaikan nama Anak Berhadapan Dengan Hukum pada Register Diversi
- 5.2.0 Militer : Penambahan/Penyesuaian Klasifikasi Perkara
- 5.2.0 Penambahan Penunjukan Panitera Pengganti Pemeriksaan PK

No	Versi	Deskripsi
1	5.2.0	Perbaikan pada Jumlah Eksekusi untuk memperbaiki Pesan Error Code Error 194
2	5.2.0	Umum/Agama (MS) : Perbaikan pada modul integrasi SIPP e-Berpadu
3	5.2.0	TUN : Pendaftaran PILKADA melalui e-Court
4	5.2.0	TUN : Pendaftaran Perlawanan Dismissal melalui e-Court
5	5.2.0	TUN : Penambahan kolom saran perbaikan gugatan di SIPP
6	5.2.0	Agama : Perakaman data Wakaf, Mempelai, Anak, Alasan Nikah
7	5.2.0	Agama : Penambahan Referensi Opsi pada Pembatalan Kawin, Alasan Penguasaan Anak, Pengesahan Anak, Pelaksanaan Eksekusi, Tingkat Pendidikan, Obyek Wakaf, Ijin Poligami, Istbat Nikah.
8	5.2.0	Agama : Penambahan fitur eksekusi Anak
9	5.2.0	Umum : Pendaftaran konsinyasi melalui e-Court
10	5.2.0	Umum/Agama : Pendaftaran Pembatalan Arbitrase/Arbitrase Syariah melalui e-Court
11	5.2.0	Umum/Agama : Pendaftaran Verzet melalui e-Court
12	5.2.0	Umum/Agama/TUN : Permohonan berperkara dengan pembebasan biaya perkara melalui e-Court
13	5.2.0	Umum/Agama/TUN : Pengisian Surat Tercatat pada Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Putusan
14	5.2.0	Anonimasi data sesuai dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan pada SIPP Web

No	Versi	Deskripsi
7	5.2.0	Agama : Penambahan Referensi Opsi pada Pembatalan Kawin, Alasan Penguasaan Anak, Pengesahan Anak, Pelaksanaan Eksekusi, Tingkat Pendidikan, Obyek Wakaf, Ijin Paligami, Istibat Nikah.
8	5.2.0	Agama : Penambahan fitur eksekusi Anak
9	5.2.0	Umum : Pendaftaran konsinyasi melalui e-Court
10	5.2.0	Umum/Agama : Pendaftaran Pembatalan Arbitrase/Arbitrase Syariah melalui e-Court
11	5.2.0	Umum/Agama : Pendaftaran Verzet melalui e-Court
12	5.2.0	Umum/Agama/TUN : Permohonan berperkara dengan pembebasan biaya perkara melalui e-Court
13	5.2.0	Umum/Agama/TUN : Pengisian Surat Tercatat pada Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Putusan
14	5.2.0	Analisasi data sesuai dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/3K/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan pada SIPP Web
15	5.2.0	Perbaikan pagination halaman pada SIPP Web
16	5.2.0	Penyesuaian tampilan detail informasi pada fitur eksekusi
17	5.2.0	Penambahan referensi KUA seluruh Indonesia pada inputan Nama KUA Perkara Cerai dan Istibat Nikah
18	5.2.0	Umum/MS : Perbaikan nama Anak Berhadapan Dengan Hukum pada Register Diversi
19	5.2.0	Miller : Penambahan/Penyesuaian Klasifikasi Perkara
20	5.2.0	Penambahan Penunjukan Panitera Pengganti Pemeriksaan PK

Gambar 5 Daftar Pembaruan Fitur SIPP Versi 5.2.0

Dengan format SIPP versi dari 5.3.0, terdapat fitur – fitur baru yaitu :

- 5.3.0 Perbaikan pada fitur Verifikasi Pembebasan Biaya Perkara yang berasal dari e-Court
- 5.3.0 Umum/Agama (MS) : Perbaikan pada modul integrasi SIPP e-Berpadu
- 5.3.0 Penambahan fitur Administrasi Persidangan Secara Elektronik
- 5.3.0 Penambahan fitur Pendaftaran Praperadilan dari e-Berpadu
- 5.3.0 Perbaikan Pada Input Data Eksekusi
- 5.3.0 Perbaikan Pemberitahuan Putusan
- 5.3.0 (Agama) Perbaikan Edit Data Umum, error alasan

No	Versi	Deskripsi
1	5.3.0	Perbaikan pada fitur Verifikasi Pembebasan Biaya Perkara yang berasal dari e-Court
2	5.3.0	Umum/Agama (MS) : Perbaikan pada modul integrasi SIPP e-Berpadu
3	5.3.0	Penambahan fitur Administrasi Persidangan Secara Elektronik
4	5.3.0	Penambahan fitur Pendaftaran Praperadilan dari e-Berpadu
5	5.3.0	Perbaikan Pada Input Data Eksekusi
6	5.3.0	Perbaikan Pemberitahuan Putusan
7	5.3.0	(Agama) Perbaikan Edit Data Umum, error alasan

Gambar 6 Daftar Pembaruan Fitur SIPP Versi 5.3.0

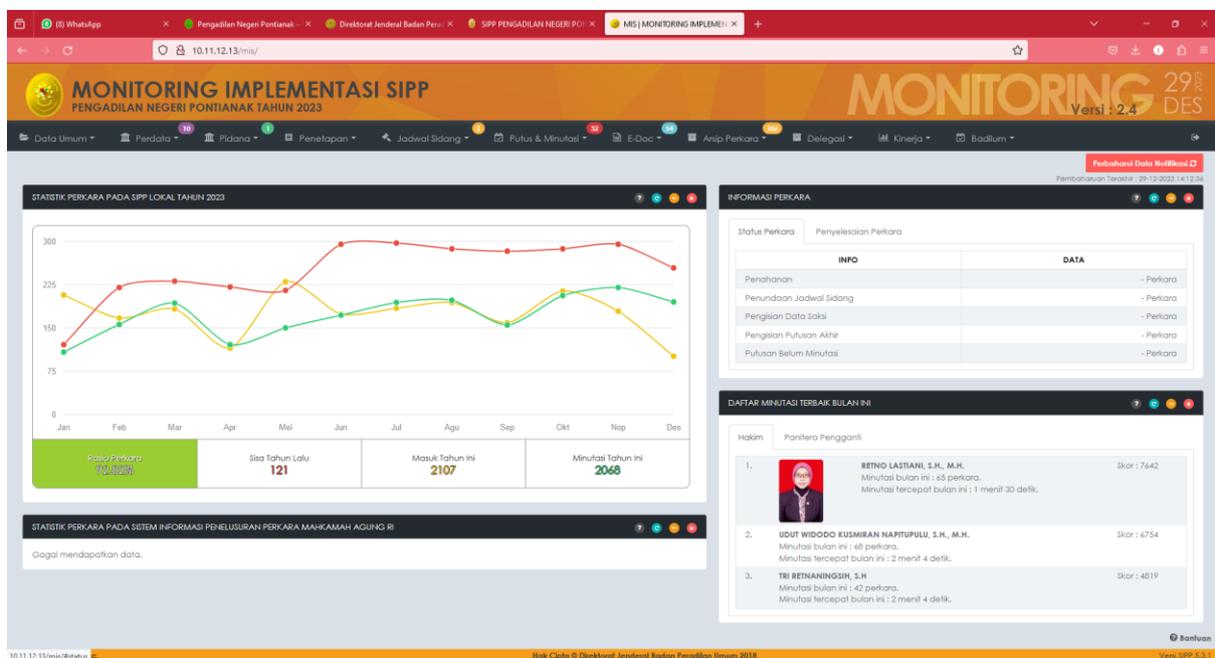
- Dengan format SIPP versi dari 5.3.1, terdapat fitur – fitur baru yaitu :
- 5.3.1 Umum, Agama dan TUN : Perbaikan pada Perekaman Data Putusan Verzet
 - 5.3.1 Umum, Agama dan TUN : Perbaikan pada fitur Verifikasi Prodeo
 - 5.3.1 Umum, Agama dan TUN : Perbaikan pada fitur Laporan Perkara Hakim (tidak menampilkan nama Hakim yang tidak aktif)
 - 5.3.1 Umum, Agama dan TUN : Optimasi penyajian data pada fitur Jurnal Keuangan Perkara
 - 5.3.1 Umum dan Mahkamah Syarriyah : Perbaikan pada fitur Sinkronisasi Data e-Berpadu dengan SIPP
 - 5.3.1 Umum dan Agama : Perbaikan pada penyajian data di Halaman Tab Eksekusi
 - 5.3.1 Umum : Perbaikan pada Perekaman Data Minutasi Perkara PHI dengan Nilai Sengketa di Bawah 150 Juta
 - 5.3.1 Umum : Penambahan Data Referensi Satuan Kerja BNN dan KPK pada fitur Referensi Penyidik
 - 5.3.1 Umum : Perbaikan pada Penomoran Perkara Eksekusi Perkara PHI
 - 5.3.1 Umum : Perbaikan pada fitur Riwayat Penahanan
 - 5.3.1 Agama : Perbaikan pada perekaman data Izin Cerai pada Tab Data Umum
 - 5.3.1 Agama : Perbaikan pada fitur perekaman data Putusan Perkara Pra Pidana Jinayat
 - 5.3.1 Agama : Perbaikan pada perekaman data Alasan Dispensasi Kawin pada Tab Data Umum

No	Versi	Deskripsi
1	5.3.1	Umum, Agama dan TUN : Perbaikan pada Perekaman Data Putusan Verzet
2	5.3.1	Umum, Agama dan TUN : Perbaikan pada fitur Verifikasi Prodeo
3	5.3.1	Umum, Agama dan TUN : Perbaikan pada fitur Laporan Perkara Hakim (tidak menampilkan nama Hakim yang tidak aktif)
4	5.3.1	Umum, Agama dan TUN : Optimasi penyajian data pada fitur Jurnal Keuangan Perkara
5	5.3.1	Umum dan Mahkamah Syarriyah : Perbaikan pada fitur Sinkronisasi Data e-Berpadu dengan SIPP
6	5.3.1	Umum dan Agama : Perbaikan pada penyajian data di Halaman Tab Eksekusi
7	5.3.1	Umum : Perbaikan pada Perekaman Data Minutasi Perkara PHI dengan Nilai Sengketa di Bawah 150 Juta
8	5.3.1	Umum : Penambahan Data Referensi Satuan Kerja BNN dan KPK pada fitur Referensi Penyidik
9	5.3.1	Umum : Perbaikan pada Penomoran Perkara Eksekusi Perkara PHI
10	5.3.1	Umum : Perbaikan pada fitur Riwayat Penahanan
11	5.3.1	Agama : Perbaikan pada perekaman data izin Cerai pada Tab Data Umum
12	5.3.1	Agama : Perbaikan pada fitur perekaman data Putusan Perkara Pra Pidana Jinayat
13	5.3.1	Agama : Perbaikan pada perekaman data Alasan Dispensasi Kawin pada Tab Data Umum

Gambar 7 Daftar Pembaruan Fitur SIPP Versi 5.3.1

Dengan adanya aplikasi SIPP bertujuan untuk memudahkan para pencari keadilan dan masyarakat yang memerlukan perkembangan informasi perkembangan perkara yang ditangani oleh tiap-tiap Pengadilan, yang salah satunya adalah menginput data dengan tepat waktu dan akurat.

Capaian rasio penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A dari bulan Januari sampai Desember 2023 dapat dilihat pada aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yaitu sebesar 92.82% dengan rincian sisa perkara tahun 2022 adalah 121 perkara, perkara masuk tahun 2023 adalah 2107 perkara, dari total 2.286 beban perkara tahun 2023, yang berhasil minutasikan tahun ini sebanyak 2068 perkara dengan sisa tahun 2023 sebanyak 160 perkara.



Gambar 8 Capture Rasio Penyelesaian Perkara PN Pontianak

Capaian rasio penyelesaian perkara pada Evaluasi Implementasi SIPP kategori Pengadilan Kelas 1A dengan beban perkara >2000 perkara di Pengadilan Negeri Pontianak dari bulan Januari sampai tanggal 29 Desember 2023 yaitu 974.17 peringkat ketujuh (7) dari sebelas (11) satuan kerja;

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	>2000	IA	Pengadilan Negeri Mojokerto	150.93	544.28	120.91	169.21	985.33
2	>2000	IA	Pengadilan Negeri Malang	154.14	541.16	120.73	168.39	984.42
3	>2000	IA	Pengadilan Negeri Jember	151.99	541.55	120.90	169.22	983.66
4	>2000	IA	Pengadilan Negeri Pekanbaru	150.07	539.26	120.79	168.39	978.51
5	>2000	IA	Pengadilan Negeri Bitar	156.42	543.84	108.92	169.31	978.49
6	>2000	IA	Pengadilan Negeri Batam	149.99	536.97	120.71	167.37	975.04
7	>2000	IA	Pengadilan Negeri Pontianak	155.26	530.32	120.82	167.77	974.17
8	>2000	IA	Pengadilan Negeri Cibinong	147.31	537.82	120.67	168.23	974.03
9	>2000	IA	Pengadilan Negeri Bale Bandung	149.75	530.86	120.68	167.71	969.00
10	>2000	IA	Pengadilan Negeri Denpasar	147.16	538.22	120.63	161.56	967.57
11	>2000	IA	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	138.78	506.22	120.47	160.27	926.74

Gambar 9 Nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) PN Pontianak kategori >2000 Perkara

Capaian rasio penyelesaian perkara pada Evaluasi Implementasi SIPP kategori Wilayah Pengadilan Tinggi Pontianak perkara di Pengadilan Negeri Pontianak dari bulan Januari sampai tanggal 29 Desember 2023 yaitu 974.17 peringkat kedua (2) dari sepuluh (10) satuan kerja;

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Mempawah	149.40	548.59	101.80	186.49	986.28
2	>2000	IA	Pengadilan Negeri Pontianak	155.26	530.32	120.82	167.77	974.17
3	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Singkawang	150.98	543.66	93.81	185.33	973.80
4	501-1000	II	Pengadilan Negeri Sambas	148.43	546.92	93.81	184.64	973.80
5	1-500	II	Pengadilan Negeri Putussibau	145.55	533.64	102.00	185.99	967.18
6	1-500	II	Pengadilan Negeri Bengkayang	152.85	533.32	93.93	186.92	967.02
7	501-1000	II	Pengadilan Negeri Sanggau	145.57	544.15	86.00	186.76	962.78
8	1-500	II	Pengadilan Negeri Sintang	145.95	528.13	101.67	186.87	962.62
9	501-1000	II	Pengadilan Negeri Ketapang	147.27	534.55	93.86	186.89	962.57
10	1-500	II	Pengadilan Negeri Hgabang	154.00	529.80	85.75	186.11	955.66

Gambar 10 Nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) PN Pontianak kategori Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak

Sebagai wujud ketertiban pengisian data pada aplikasi SIPP serta tertib administrasi dan keuangan perkara, maka pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A mendapat penghargaan Lomba Administrasi dan Keuangan Perkara Harapan II Kategori Satuan Kerja Kelas IA.



Gambar 11 Piagam Penghargaan Lomba Administrasi dan Keuangan Perkara Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A

4. IMPLEMENTASI ERATERANG DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A menerima pengajuan permohonan surat keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan tidak dicabut Hak dipilih dan Memilih secara online melalui *website* <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/> dengan jumlah pengajuan surat keterangan melalui Eraterang yaitu berjumlah 1722 surat permohonan online, yang terdiri dari Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana sebanyak 1714 dan Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sebanyak 8 Surat Keterangan.

Untuk mendukung itu Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A mempersiapkan berupa:

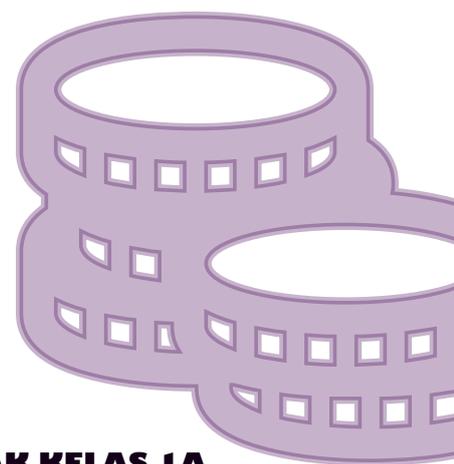
- a. Perangkat Keras



Untuk Pengelolaan teknologi informasi pengadaan perangkat keras Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A pada tahun 2022 berupa Perangkat Komputer dan Printer. Jaringan Internet ICON+ 35 Mbps dan Indihome FO lancar dengan kecepatan 100 Mbps.

b. Perangkat Lunak

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah memiliki Website dengan alamat <http://www.pn-pontianak.go.id> dalam mendukung keterbukaan informasi bagi masyarakat umum untuk mengakses rangkaian kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A. Selain itu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Direktori Putusan Mahkamah Agung, Komdanas dan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung R.I dilaksanakan dengan progress yang lebih baik dan tertib dalam menginput data dalam satuan perangkat kerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (*Court of Excellence*). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area "Peradilan yang Agung" yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu : pengarah/pengendali (*driver*), sistem dan penggerak (*system and enabler*), dan hasil (*result*).

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A berdasarkan penilaian tim Badilum telah mendapat Akreditasi "A Excellent" namun demikian Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A



telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.

Pemberian layanan dan penanganan perkara dituntut untuk memiliki kualitas yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan para pencari keadilan. Kebutuhan ini mendorong dibentuknya program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada Mahkamah Agung RI, yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Untuk melanjutkan program APM tersebut, serta untuk mengintegrasikan dengan program pemerintah lain seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan Zona Integritas maka Mahkamah Agung RI menyusun program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul (SMPU), yang akan diterapkan di empat lingkungan peradilan (peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara).

Dalam memudahkan satuan tugas pengadilan tinggi dan pengadilan negeri melaksanakan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyusun Pedoman Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul.

Nantinya, hanya satu pedoman ini yang diperlukan oleh pengadilan dalam melakukan pengukuran ketepatan dan kesesuaian untuk penilaian dalam Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul apakah satuan kerja sudah menjalankan tugas pelayanan pencari keadilan dengan baik.





Gambar 12 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu PN Pontianak

Bahwa sesuai dengan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 Tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Dan IA Tahun 2022, Pengadilan Negeri Pontianak mendapat nilai Akreditasi Penjaminan Mutu sebesar 713 dengan Predikat A.





**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS DAN IA
TAHUN 2022**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS
DAN IA TAHUN 2022.
- KESATU** : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi,
Pengadilan Negeri kelas IA Khusus dan IA berdasarkan rapat
Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagaimana terlampir
dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022



Kepada :

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR





PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022
TANGGAL 9 DESEMBER 2022

NO.	NAMA PENGADILAN	TIPE	NILAI AKREDITASI 2021	NILAI AKREDITASI 2022	PREDIKAT
1 s/d 81	dst.				
82	Pengadilan Negeri Pontianak	IA	713	713	A
83 s/d 98	dst.				



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE



Gambar 13 Petikan Keputusan Dirjen Badilum Tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus dan 1A Tahun 2022



B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam upaya peningkatan kualitas, pelayanan publik harus dilaksanakan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pengadilan pada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, terbuka, transparan dan mudah serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan semangat Surat Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2019 tentang Tentang Standar Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan Surat Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP +) dan surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A terus berupaya untuk mewujudkan kepuasan para pencari keadilan, salah satunya dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gated Integrated Service*), yang terdiri dari Pelayanan Kepaniteraan dan Pelayanan Kesekretariatan, yang terdiri dari :

- 6 (enam) Pelayanan Kepaniteraan, yaitu Pidana, Perdata, Hukum, Tipikor, Perikanan dan PHI;
- 1 (satu) Pelayanan Kesekretariatan, yaitu Umum.
- 1 (satu) meja petugas e-court
- 1 (satu) meja inzage



Gambar 14 Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Pontianak

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A selalu berupaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, salah satunya dengan memberikan briefing setiap pagi kepada petugas layanan PTSP guna pengembangan sumber daya manusia.



Gambar 15 Briefing rutin Petugas PTSP

Hasil dari buah kerja keras Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A untuk meningkatkan layanan PTSP adalah pada akhir tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A mendapat penghargaan Peringkat Harapan II Kategori Terbaik Pengadilan Negeri Kelas 1A, prestasi tersebut meningkat dari tahun 2022 yang mendapat penghargaan Harapan III untuk kategori yang sama.





Gambar 16 Piagam Penghargaan Lomba PTSP PN Pontianak

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pelayan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Tuntutan masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin banyak, hal tersebut menuntut Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A cepat beradaptasi dan menjawab kebutuhan masyarakat untuk dapat melakukan perubahan kearah yang lebih baik lagi. Untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakatnya maka Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan harus cepat, tepat dan transparan. Pelayanan publik yang cepat, tepat dan transparan harus dikelola dengan suatu sistem yang baik pula, seperti pada saat ini dituntut untuk menggunakan sistem elektronik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A serta peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, maka



perlu adanya inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A terus berupaya meningkatkan pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan kemudahan serta kepuasan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2019 dan tahun 2020 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A telah membuat inovasi-inovasi yang berkaitan dengan pelayan publik, diantaranya Aplikasi Sutera-WA (Surat Keterangan waris), Setara (Surat Keterangan Perkara), aplikasi Survey dan Informasi Harian Pengadilan (INDI/whatsApp bot), kemudian pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A kembali membuat Inovasi pada layanan Publik yaitu Aplikasi e-PerMa.

1. APLIKASI SUTERA WA+

Dalam mendukung Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dengan mengembangkan Aplikasi Sutera Wa menjadi ***Aplikasi Sutera Wa+***.

Tim Pelayan Publik telah mengembangkan Aplikasi Sutera Wa menjadi Aplikasi Sutera Wa+, dengan menambahkan menu dalam aplikasi guna memudahkan masyarakat dalam mengakses ***aplikasi Sutera Wa+*** (Surat Keterangan Waris).

Tim Pelayan Publik telah mensosialisasikan ***Aplikasi Sutera Wa+*** secara internal maupun secara eksternal. Dengan demikian aplikasi tersebut diharapkan lebih mempermudah masyarakat dalam memperoleh surat keterangan waris dengan cara melengkapi serta mengupload dokumen-dokumen pendukung, sehingga Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A lebih efektif dan efisien dalam menerbitkan surat keterangan waris.

Untuk melakukan pendaftaran online Sutera Wa+ ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu :

1. Registrasi

Pemohon melakukan registrasi melalui situs berikut <https://suterawa.pn-pontianak.go.id>

2. Input Formulir

Pemohon mengisi data dan mengupload dokumen pada form yang telah disediakan di dalam Aplikasi tersebut

3. Notifikasi *Email*

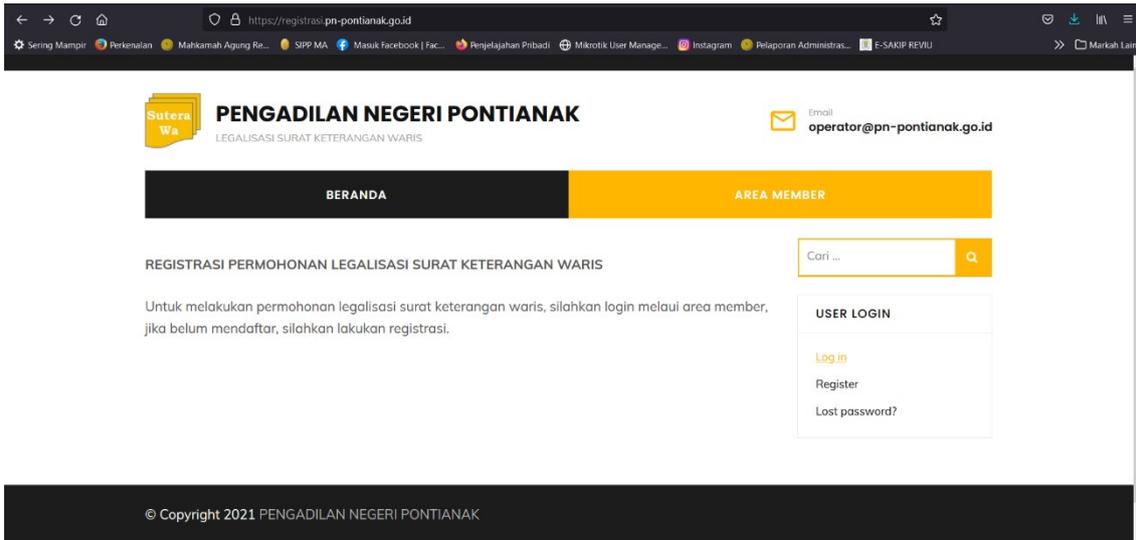


Pemohon mendapatkan notifikasi *email* bahwa permohonan surat keterangan waris sudah diterima oleh Petugas Pengadilan Negeri Pontianak.

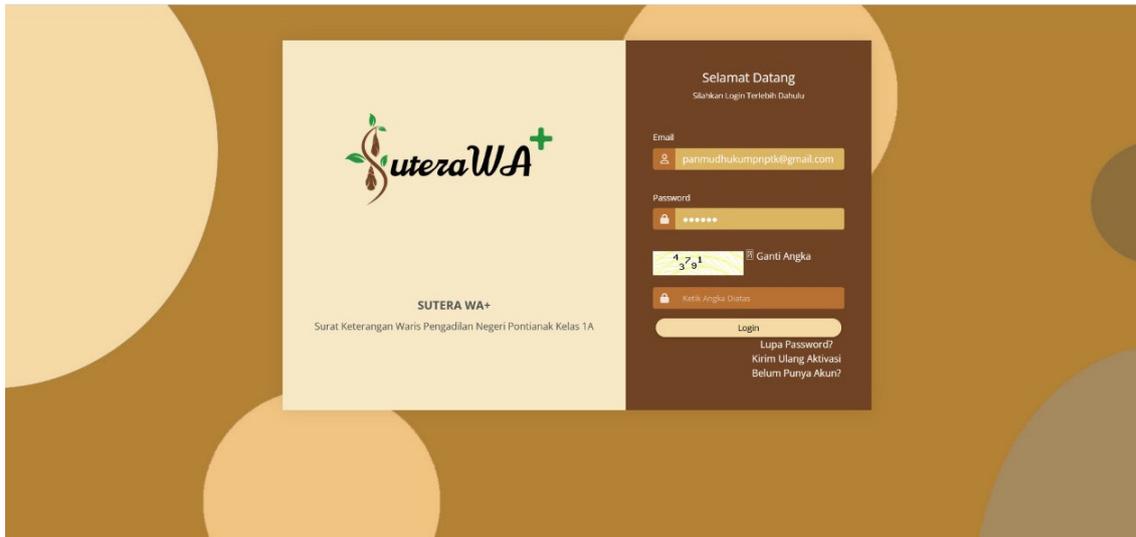
4. Datang ke Pengadilan

Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan membawa dokumen asli yang sudah di upload ke PTSP bagian Kepaniteraan Hukum.

Dalam pelaksanaannya di tahun 2023 telah dikeluarkan Surat Keterangan Waris sebanyak 5 Keterangan



Gambar 17 Tampilan Aplikasi "Sutera WA" awal rilis



Gambar 18 Tampilan Aplikasi "Sutera WA+" setelah diperbaharui

2. APLIKASI SETARA

Dalam mendukung Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dengan mengembangkan Aplikasi Setara yang saat ini masih dalam proses pengembangan baik tampilan maupun melengkapi menu, agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses Aplikasi Setara tersebut.

Aplikasi Setara (Surat Keterangan Perkara) diharapkan mempermudah masyarakat/badan hukum dalam memperoleh surat keterangan perkara dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan melalui form upload dokumen, sehingga Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A lebih efektif dan efisien dalam menerbitkan surat keterangan perkara.

Untuk melakukan pendaftaran online Setara ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu :

1. Registrasi

Pemohon melakukan registrasi melalui situs berikut <https://setara.pn-pontianak.go.id/>

2. Input Formulir

Pemohon mengisi data dan mengupload dokumen pada form yang telah disediakan di dalam Aplikasi tersebut

3. Notifikasi *Email*

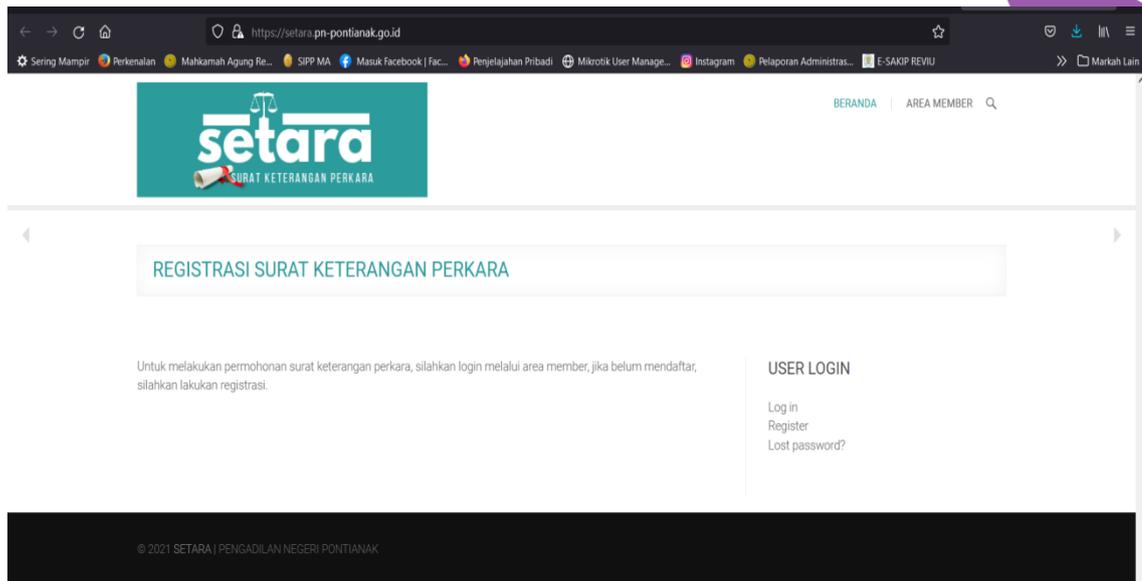
Pemohon mendapatkan notifikasi *email* bahwa permohonan surat keterangan perkara sudah diterima oleh Petugas Pengadilan Negeri Pontianak

4. Datang ke Pengadilan

Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan membawa dokumen asli yang sudah di upload ke PTSP Bagian Kepaniteraan Hukum.

Dalam pelaksanaannya di tahun 2023 telah dikeluarkan Surat Keterangan Perkara sebanyak 30 Keterangan;





Gambar 19 Tampilan Aplikasi "Setara" PN Pontianak

3. APLIKASI E-PERMA

Aplikasi e-PerMa adalah layanan elektronik yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) secara online di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.

Selama ini pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) masih dilakukan secara manual yang tentunya memakan waktu dalam proses penyelesaiannya. Jumlah pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) sampai dengan bulan Oktober 2022 sudah tercatat sebanyak 1.119. Wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A mencakup seluruh wilayah Kalimantan Barat, sehingga masyarakat/badan hukum di Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kalimantan Barat untuk melakukan pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) memerlukan waktu, biaya transportasi serta akomodasi yang lebih. Dari pemikiran tersebut diperlukan adanya suatu inovasi berupa aplikasi guna memangkas birokrasi, menghemat waktu serta biaya transportasi dan akomodasi untuk pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) serta meningkatkan efisiensi kinerja Kepaniteraan PHI pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.

Aplikasi e-PerMa ini sudah di launching oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 1 Nopember 2022 serta disosialisasikan secara internal maupun secara eksternal.





Dengan demikian Aplikasi e-PerMa (Perjanjian Bersama) diharapkan dapat mempermudah masyarakat/badan hukum untuk pendaftaran Perjanjian Bersama secara elektronik dengan melengkapi serta mengupload dokumen-dokumen pendukung, sehingga Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A lebih efektif dan efisien dalam menerbitkan Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama.

Untuk melakukan pendaftaran online e-PerMa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu :

1. Registrasi

Buka laman www.eperma.pn-pontianak.go.id/

2. Membuat Akun

Membuat Akun dengan memasukkan data yang diperlukan

3. *Login*

Login menggunakan akun yang didaftarkan

4. Daftarkan permohonan

Pemohon dapat mendaftarkan Perjanjian Bersama

5. Isi data

Pemohon dapat menginput data yang dibutuhkan

6. Cek status Permohonan secara berkala

Jika sudah mendaftar silahkan cek status secara berkala

7. Datang ke Pengadilan jika Permohonan diterima

Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan membawa dokumen asli yang sudah di upload ke PTSP Bagian Kepaniteraan PHI

8. Verifikasi

Verifikasi berkas asli di PTSP layanan PHI Pengadilan Negeri Pontianak

9. Penyerahan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama

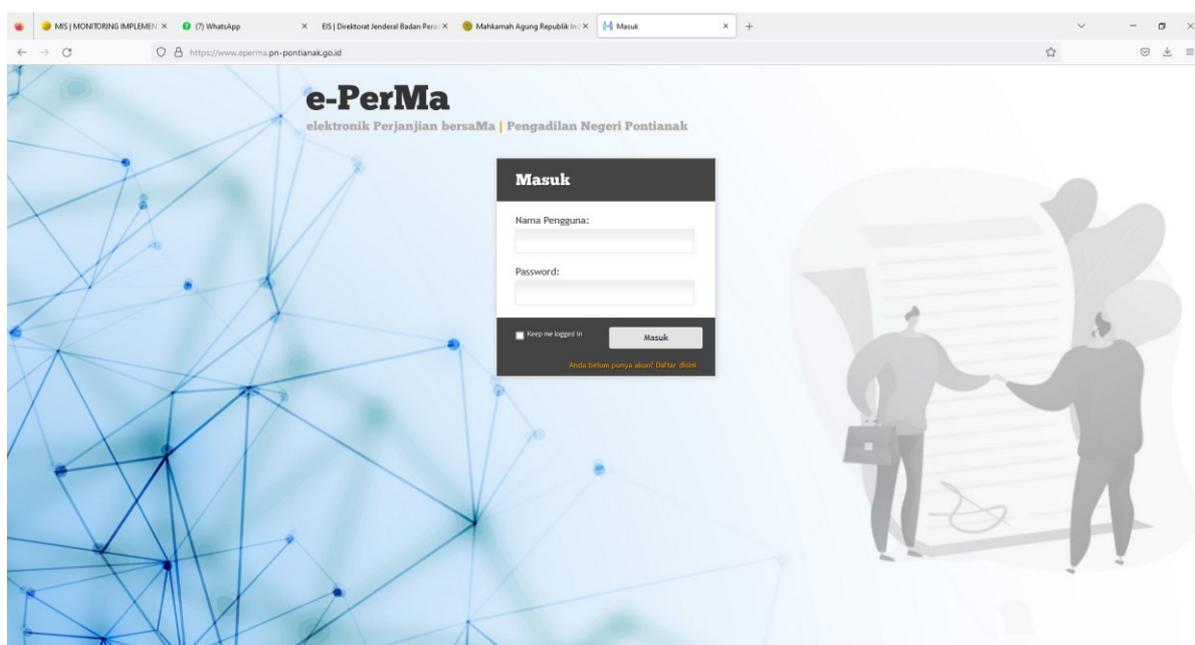
Petugas PTSP layanan PHI menyerahkan Perjanjian Bersama yang telah di tandatangani



Dalam pelaksanaan Bipartit di tahun 2023 telah dikeluarkan Surat Perjanjian Bersama secara manual sebanyak 1119 Perjanjian Bersama dan secara aplikasi sebanyak 127 Perjanjian Bersama sehingga total tahun 2023 sebanyak 1246 Perjanjian Bersama yang telah di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A;

Dalam pelaksanaan Mediasi di tahun 2023 telah dikeluarkan Surat Perjanjian Bersama secara manual sebanyak 91 Perjanjian Bersama dan secara aplikasi sebanyak 1 Perjanjian Bersama sehingga total tahun 2023 sebanyak 92 Perjanjian Bersama yang telah di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A;

Dalam pelaksanaan Konsiliasi di tahun 2023 telah dikeluarkan Surat Perjanjian Bersama secara manual sebanyak 0 Perjanjian Bersama dan secara aplikasi sebanyak 105 Perjanjian Bersama sehingga total tahun 2023 sebanyak 105 Perjanjian Bersama yang telah di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A;



Gambar 20 Tampilan Aplikasi "e-PERMA" PN Pontianak



Pada akhir tahun 2023, aplikasi e-PerMa mendapatkan penghargaan kategori Penerapan Inovasi Terbaik pada acara Penghargaan Peningkatan Kinerja Peradilan Umum.



Gambar 21 Piagam Penghargaan Penerapan Inovasi Terbaik Tahun 2023

4. APLIKASI INFORMASI HARIAN PENGADILAN (INDI)

Aplikasi Informasi Harian Pengadilan (INDI) merupakan salah satu inovasi Pelayanan Publik yang berskala Internasional untuk memperoleh informasi yang diperlukan masyarakat dari Pengadilan Negeri Pontianak melalui aplikasi WhatsApp dimana saja kita berada.

Penggunaan Aplikasi Informasi Harian Pengadilan (INDI) dengan mudah diakses oleh masyarakat untuk memperoleh informasi-informasi dari layanan pengadilan melalui aplikasi WhatsApp di nomor **081257758489** dengan cara mengetik "info", kemudian masyarakat akan mendapatkan pesan (berupa panduan atau arahan) untuk memperoleh informasi yang diinginkan.





Gambar 22 Banner Aplikasi "INDI" PN Pontianak

5. BROSUR AUDIO BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya terhadap kaum disabilitas, Pengadilan Negeri Pontianak membuat inovasi berupa e-BROSUR yang berisi mengenai informasi pendaftaran perkara dan proses beracara, disusun dengan memperhatikan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi dan terintegrasi dengan *Website* PN Pontianak Kelas 1A.





Gambar 23 Brosur Audio Pelayanan dan Proses Beracara

6. BROSUR LAYANAN PRIORITAS

Pengadilan Negeri Pontianak juga menyediakan e-BROSUR yang menampilkan daftar sarana dan prasarana bagi pengunjung disabilitas ataupun kelompok prioritas yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.



Gambar 24 Brosur Layanan Prioritas

7. PENDAFTARAN POSBAKUM SECARA ELEKTRONIK

Jika sebelumnya pendaftaran Pihak yang ingin menggunakan layanan Posbakum dilaksanakan secara manual, maka dari itu PN Pontianak membuat inovasi berupa pendaftaran posbakum melalui google form sehingga mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan Posbankum pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.



Gambar 25 Brosur Digital Formulir Pelayanan Posbakum

8. DIGITALISASI FORM PERSONAL SECARA ELEKTRONIK

Adalah digitalisasi form personal melalui google form sehingga mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan disabilitas meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOn1S7_04QyRdzNhOu1ws1WkALUtv0jkDeVrVFLi4SeiCQoA/viewform

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

PENILAIAN PERSONAL PENYANDANG DISABILITAS PTSP PIDANA

FORMULIR PENILAIAN PERSONAL PENYANDANG DISABILITAS PTSP PIDANA

Formulir Penilaian Personal Penyandang Disabilitas ini adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis atau psikis untuk menentukan akomodasi yang layak. Formulir ini sudah disesuaikan dengan SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU /SK/PS/12/2020.

work.chorryiga@gmail.com (not shared) [Switch account](#)

* Required

Gambar 26 Form personal melalui Google Form

9. PENERAPAN PANGGILAN SIDANG MELALUI AUDIO

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A pada setiap memulai persidangan untuk memanggil pihak dalam perkara perdata serta memanggil terdakwa pada perkara pidana untuk dihadirkan didalam persidangan dan diumumkan bahwa sidang akan segera dimulai panggilan sidang melalui audio.

10. PENERAPAN PENGUMUMAN AUDIO PERINGATAN PERILAKU ANTI GRATIFIKASI

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A juga sesuai surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 17 Tahun 2019 sudah menerapkan pengumuman audio peringatan perilaku anti gratifikasi secara otomatis diumumkan melalui audio yang ada di Pengadilan Negeri Pontianak setiap 2 jam sekali

11. PEMBANGUNAN POS JAGA

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A juga telah mendirikan bangunan Pos Jaga Security depan dengan tujuan agar para pengunjung yang datang dapat diarahkan oleh petugas jaga, dan meminimalisir tamu tidak diketahui masuk ke area PN Pontianak Kelas 1A.





Gambar 27 Pos jaga PN Pontianak Kelas 1A

12. PEMBUATAN PORTAL MASUK AREA PN PONTIANAK

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A juga telah membuat Portal masuk dan keluar untuk memastikan pengunjung atau tamu yang datang terdeteksi tidak membahayakan bagi yang berada di Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A.



Gambar 28 Portal Masuk Area PN Pontianak

13. PERLUASAN AREA PARKIR KENDARAAN

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A juga telah mengupayakan memperluas area Parkir bagi pengunjung/pengguna layanan, agar pengunjung/pengguna merasa nyaman dan aman saat meninggalkan kendaraan yang dibawa.



Gambar 29 Area Parkir Kendaraan PN pontianak Kelas 1A

14. PENAMBAHAN MEJA LAPOR SIDANG

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A juga menyediakan tambahan layanan Petugas dan meja lapor sidang yang bertujuan agar para Pihak bisa mendaftarkan kehadiran pada hari sidang yang dijadwalkan sehingga nanti akan dikondisikan oleh Petugas Jaga Sidang. Para pihak tidak lagi kebingungan untuk mencari Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara tersebut, jika para Pihak sudah lapor dan lengkap akan di panggil dan di arahkan ke ruang sidang yang telah ditentukan dengan menggunakan pengeras suara oleh petugas lapor sidang. Layanan ini juga akan memperkecil pertemuan secara langsung antara para Pihak dengan pegawai PN Pontianak Kelas 1A, sehingga meminimalisir tindakan gratifikasi dan sejenisnya.





Gambar 30 Meja Lapor Sidang PN Pontianak

15. LAYANAN DISABILITAS

Pengadilan Negeri Pontianak berupaya meningkatkan Pelayanan Publik dengan cara memenuhi hak Difabel yang diantaranya dengan menyediakan sarana dan prasarana yaitu Jalur Khusus Penyandang Disabilitas, Kartu Prioritas Disabilitas, Kursi Roda, Tongkat Putih, Toilet Aksesibel dan pegangan rambat, Area tunggu kursi roda, Pintu Jalur Disabilitas, Alat Bantu Dengar.



Gambar 31 Kursi Roda dan Tongkat Bantu Jalan untuk kaum Difabel



Gambar 32 Guiding Block di Area Lobby PTSP



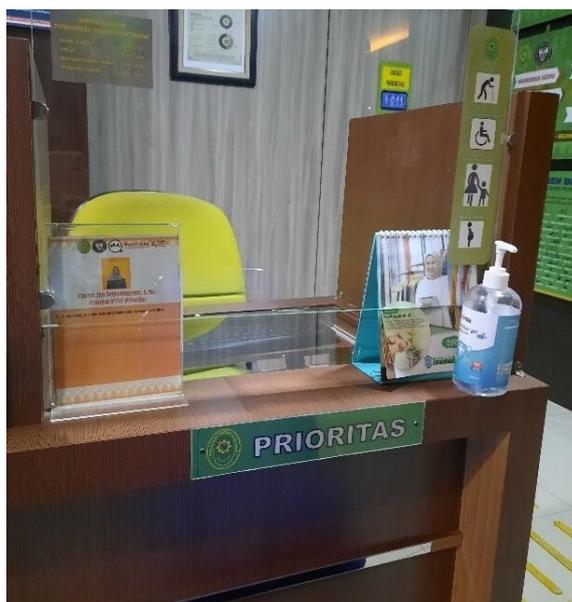
Gambar 33 Jalur Landai bagi Penyandang Difabel



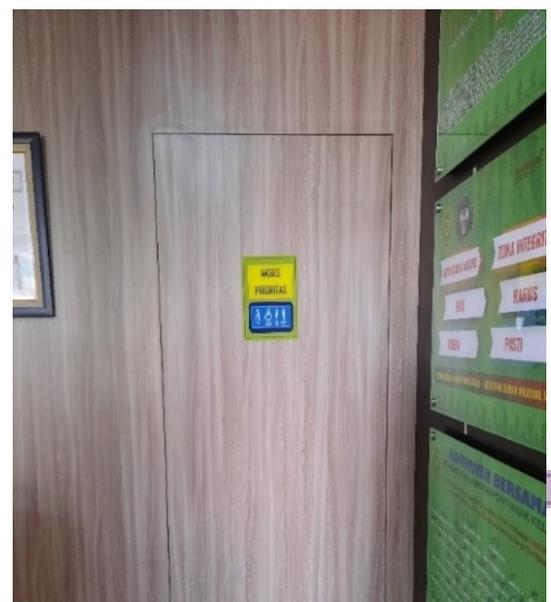
Gambar 34 Kartu Antrian Prioritas



Gambar 35 Toilet khusus kaum Difabel yang dilengkapi handrail



Gambar 36 Meja Layanan PTSP Prioritas



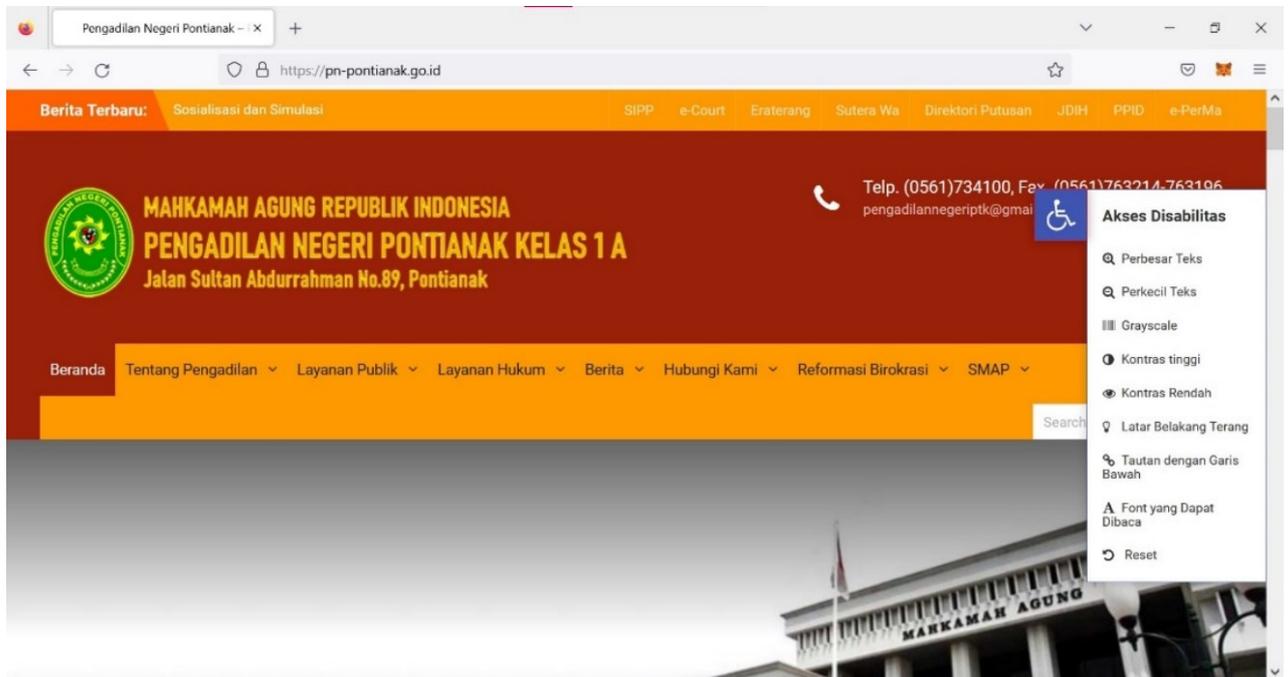
Gambar 37 Pintu Akses Prioritas



Gambar 38 Tempat Parkir bagi kaum Difabel



Gambar 39 Kursi khusus bagi kaum Difabel



Gambar 40 Website yang dilengkapi dengan Akses Disabilitas



16. LAYANAN UMUM

Selain beberapa layanan bagi Pengunjung Disabilitas, Pengadilan Negeri Pontianak juga memiliki layanan-layanan bagi Pengunjung Pengadilan untuk meningkatkan kenyamanan Pengunjung.



Gambar 41 Ruang Tamu Terbuka



Gambar 42 Co-working Space



Gambar 43 Pojoek Baca



Gambar 44 Kompensasi Pelayanan



Gambar 45 Brosur Pelayanan PTSP



Gambar 46 Air Minum Gratis bagi Pengunjung



Gambar 47 Charging station bagi Pengunjung



Gambar 48 Ruang Kesehatan dan Laktasi



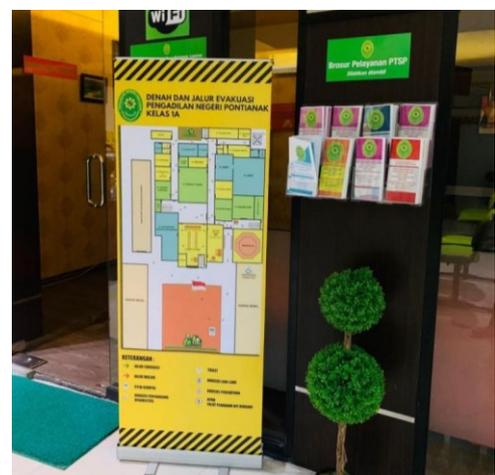
Gambar 49 Akses Free Wifi



Gambar 50 Buku Tamu Elektronik



Gambar 51 Kotak Saran



Gambar 52 Denah Kantor PN Pontianak



D. PENGHARGAAN YANG DIRAIH

Pengadilan Negeri Pontianak terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Atas komitmen tersebut, maka pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya :

1. Terbaik I Pelaksanaan Utilisasi BMN Tahun 2022 di wilayah KPKNL Pontianak.



Gambar 53 Penghargaan Pengadilan Negeri Pontianak Pelaksanaan Utilisasi BMN Tahun 2022



- Harapan II Lomba Layanan Pengadilan / PTSP Tahun 2023 Kategori Pengadilan Kelas 1A



Gambar 54 Penghargaan Pengadilan Negeri Pontianak Lomba Layanan Pengadilan/PTSP

- Harapan II Lomba Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara Tahun 2023 Kategori Pengadilan Kelas 1A



Gambar 55 Penghargaan Pengadilan Negeri Pontianak Lomba Administrasi dan Keuangan Perkara Tahun 2023

4. Peringkat III Lomba E-Litigasi Pengadilan Negeri Tahun 2023 kategori Lebih dari 1.000 Perkara



Gambar 56 Penghargaan Pengadilan Negeri Pontianak Lomba E-Litigasi Tahun 2023



5. Pemenang Lomba Inovasi Pengadilan Tahun 2023 untuk Aplikasi E-PerMa (Layanan Elektronik Pendaftaran Perjanjian Bersama)



Gambar 57 Penghargaan Pengadilan Negeri Pontianak Penerapan Inovasi Terbaik Tahun 2023



BAB VI PENGAWASAN



A. INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

A. Maksud Pengawasan :

- ❖ Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- ❖ Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan.
- ❖ Untuk menilai kinerja Aparatur Sipil Negara.

B. Tujuan Pengawasan :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

C. Fungsi Pengawasan :

- ❖ Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- ❖ Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah:

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
3. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pada Pengadilan Negeri Pontianak, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : W17-U1/2258/HK.00.8 /7/2023, tertanggal 5 Juli 2023, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, hakim-hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang adalah sebagai berikut :

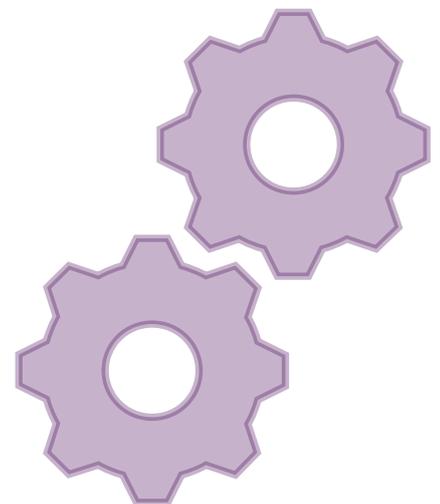
NO.	NAMA HAKIM	BIDANG PENGAWASAN
1.	H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA)	Penanggung Jawab
2.	SRI HARSIWI, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA)	Koordinator Pengawasan Bidang
3.	1. WURYANTI, S.H., M.H. 2. Dr. NOVA YUNIARTI, S.Pi., M.P.	Hakim Pengawas Bidang Perdata
4.	1. MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H. 2. NUR SYAMSU, S.T., M.Eng.	Hakim Pengawas Bidang Pidana
5.	1. JOKO WALUYO, S.H., Sp.NOT., M.M. 2. Dr URIF SYARIFUDIN, APi, MTA.	Hakim Pengawas Bidang Hukum
6.	1. TRI RETNANINGSIH, S.H. 2. EDWARD SAMOSIR, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Tipikor
7.	1. NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H. 2. HERIANTO SINAGA, S.H.	Hakim Pengawas Bidang PHI
8.	1. MOCH. NUR AZIZI, S.H. 2. Ir. GATOT RUDIYONO, S.H., M.M.	Hakim Pengawas Bidang Perikanan
9.	1. UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, S.H., M.H. 2. EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan
10.	DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Laporan
11.	DENY IKHWAN, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
12.	1. RETNO LASTIANI, S.H., M.H. 2. EDI UTOMO, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Manajemen Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan Anonimisasi
13.	YAMTI AGUSTINA, S.H.	Hakim Pengawas Panitera Pengganti
14.	KURNIA DIANTA GINTING, S.H.	Hakim Pengawas Jurusita/ Jurusita Pengganti

Tabel 23 Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

B. EVALUASI



Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak secara rutin melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Pontianak melalui Briefing atau Rapat Bulanan yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas untuk kemudian didiskusikan dalam rapat untuk mencari solusi yang terbaik yang dapat menunjang kelancaran tugas-tugas dalam organisasi Pengadilan Negeri Pontianak serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Pontianak.



BAB VII PENUTUP



A. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pontianak hingga saat ini sudah berjalan dengan baik, namun terdapat kekurangan dari segi Sarana Prasarana maupun minimnya jumlah Sumber Daya Pendukung;
2. Penyerapan Realisasi Anggaran sebagai mana data yang telah kami paparkan diatas cukup baik, dimana penyerapan Anggaran secara keseluruhan untuk DIPA-01 yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung mencapai: 95.89%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung mencapai: 100% sedangkan DIPA-03 yang terdiri dari Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum mencapai: 99.85% ;

- 
3. Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksanaan Tugas Teknis dan NonTeknis Pengadilan Negeri Pontianak dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari terpenuhinya dan terlaksananya tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Pontianak dengan capaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan.

B. REKOMENDASI

Melihat dari kekurangan dan hambatan yang ada, kami membuat rekomendasi diantaranya:

1. Dari data Personil Sumber Daya Manusia antara Tenaga Teknis dan Nonteknis Peradilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas proposinya tidak sebanding, perlu penambahan tenaga non teknis dalam mendukung tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik.
2. Penambahan Sarana Teknologi Informasi dan Sumber Daya khusus untuk mengembangkan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Pontianak.
3. Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai baik teknis maupun non teknis agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.
4. Perlu adanya rehabilitasi gedung Kantor Pengadilan Negeri Pontianak mengingat semakin banyaknya perkara yang masuk dan jumlah masyarakat pencari keadilan semakin meningkat sehingga dengan keadaan gedung kantor yang sekarang tidak memadai serta diperlukannya area steril untuk hakim dengan keadaan gedung kantor yang belum prototype masih belum bisa membuat area yang benar-benar steril untuk hakim.





SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A
TAHUN 2023



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

Nomor :99/KPN.W17-U1/HK.1.2.5/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan good governance dan accountability untuk terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisiensi dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).
 - b. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dihimbau untuk Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023;
 - c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawah;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/VIII2007 tentang memberlakukan Buku I, Bagian Ketiga tentang Prosedur Penyampaian laporan Pelaksanaan Kegiatan;

Memperhatikan : Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Nomor : W17-U1/4229/HK.00.8/12/2022 tentang Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2023;
- Kedua : Memerintahkan yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A, dengan penuh rasa tanggung jawab dan menyampaikan Laporan dimaksud kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A paling lambat Bulan Januari Minggu Ketiga;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan adanya perubahan komposisi atau perubahan pejabat penandatanganan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pontianak
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A



AKHMAD FIJARSYAH JOKO SUTRISNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK KLAS I.A
NOMOR : 99/KPN.W17-U1/HK.1.2.5/1/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A**

NO.	NAMA HAKIM	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Utin Reza Putri, S.H., M.H.	Panitera	Penanggung Jawab
	Yuniar Nelly, S.T., M.M.	Sekretaris	
3.	Andy Robert, S.Sos.	Panitera Muda Perdata	Koordinator
	Ferri Yanuardi, S.H.	Panitera Muda Pidana	
	Wisesa, S.H.	Panitera Muda Hukum	
	Kusuma Agus Cahyono, S.H.	Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi	
	Ari, S.H.	Panitera Muda Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
	Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.	Panitera Muda Khusus Perikanan	
	Fitriyani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
	Lily Widyanti, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
	Umiyati, S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
	4.	Fitriyani	
Chorry Iga Setyaningrum, A.Md.		Teknisi Sarana dan Prasarana	

Ditetapkan Di : Pontianak
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS IA

AKHMAD FIJARSYAH JOKO SUTRISNO





SCAN ME

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A

 Jln. Sultan Abdurrahman No. 89, Pontianak

 (0561) 734 100, FAX (0561) 763 214, 763 196

 pengadilannegeriptk@gmail.com

 0813 5048 5634 (Layanan Pengaduan)

 0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)